RENCANA STRATEGIS

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BANGGAI

2025 - 2029



banggai.pom.go.id

@bpom.banggai

081342211987

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN BANGGAI
Jl. Dr. Moh.Hatta, No 72 Ruko A2 Maahas – Luwuk Banggai 94711
Telp. (0461) 3205563 / 0813 42211987
Email : lokapombanggai@gmail.com, loka_banggai@pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN BANGGAI

NOMOR HK.02.02.17C.12.25.94 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2025-2029

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN BANGGAI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka POM di Kabupaten Banggai tentang Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BANGGAI TENTANG RENCANA STRATEGIS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2025-2029.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Loka POM di Kabupaten Banggai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Renstra Loka POM di Kabupaten Banggai memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Banggai untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Ketiga : Renstra Loka POM di Kabupaten Banggai sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua berfungsi sebagai:

a. acuan bagi Loka POM di Kabupaten Banggai dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Loka POM di Kabupaten Banggai.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banggai
pada tanggal : 05 Desember 2025
Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Banggai,

EMIL SYACHRUL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Loka Pengawas Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik.

Penguatan sistem pengawasan pangan, sediaan farmasi dan alat kesehatan merupakan salah satu agenda program pembangunan nasional bidang kesehatan. Penguatan sistem pengawasan pangan, dan sediaan farmasi menjadi salah satu upaya untuk menguatkan kapasitas ketahanan kesehatan yang akan mendukung percepatan pencapaian tujuan Pembangunan Nasional.

Loka POM di Kabupaten Banggai bertujuan melindungi kesehatan masyarakat melalui Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Loka POM di Kabupaten Banggai merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan POM, yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan total 4 (empat) area pengawasan di Provinsi Sulawesi Tengah.

Rencana pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal kapasitas Loka POM di Kabupaten Banggai sesuai tugas, fungsi, kewenangan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Loka POM di Kabupaten Banggai tahun 2025-2029.

Renstra Loka POM di Kabupaten Banggai tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan Loka POM di Kabupaten Banggai. Diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan Loka POM di Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029 dapat berkontribusi terhadap pencapaian output dan outcome Badan POM, sehingga dapat menjadi bentuk konkrit kontribusi Badan POM terhadap pencapaian agenda pembangunan nasional untuk mewujudkan Visi Badan POM. Renstra Loka POM di Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029 diharapkan dapat menjadi rujukan pemangku kepentingan dalam membuat program dan kegiatan yang bersinergi dengan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Capaian kinerja akan dipantau secara berkala, dan dievaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir periode Rencana Strategis sebagai impact assessment. Ucapan terima kasih saya ucapkan kepada pihak yang telah terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan Renstra Loka POM di Kabupaten Banggai tahun 2025-2029. Semoga penyusunan Renstra Loka POM di Kabupaten Banggai ini bermanfaat dalam peningkatan kualitas hidup manusia.

Banggai, 05 Desember 2025
Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Banggai,

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
BADAN POM
DI BANGGAI

Emil Syachrul, S. Si, Apt.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **ii**

DAFTAR ISI **iv**

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum 1

1.2 Potensi dan Permasalahan 34

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

2.1 Visi 60

2.2 Misi 62

2.3 Tujuan 64

2.4 Sasaran Kegiatan 68

BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM 90

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kabupaten Banggai 95

BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja 102

4.2 Kerangka Pendanaan 109

BAB V. PENUTUP

Penutup 111

LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN

LOKA POM DI KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2025-2029

BADAN POM

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

1.2 Potensi dan Permasalahan





BAB I
PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Pengembangan Rencana Strategis (Renstra) Loka POM di Kabupaten Banggai untuk periode 2025-2029 diinisiasi sebagai respons terhadap tantangan yang semakin kompleks dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Renstra Loka POM di Kabupaten Banggai dirancang untuk tidak hanya menanggapi tantangan saat ini tetapi juga untuk mengantisipasi perubahan masa depan dalam industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Pendekatan ini memungkinkan Loka POM di Kabupaten Banggai untuk tetap relevan dan efektif dalam menjalankan tugasnya, mengingat cepatnya inovasi dan perubahan dalam sektor ini.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang beredar di pasar Indonesia aman, berkhasiat/ bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Dalam menjalankan perannya, BPOM mengemban fungsi strategis dalam sistem kesehatan nasional. Lembaga ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar di pasar telah melalui evaluasi keamanan, mutu, dan efikasi yang ketat. Hal ini tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga mendukung kepercayaan konsumen terhadap produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang tersedia di pasar.

Organisasi dan Tata Kerja unit Pelaksana Teknis pada BPOM diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023. Berdasarkan peraturan tersebut BPOM bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Loka POM di Kabupaten Banggai merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM yang memiliki empat wilayah kerja di wilayah timur Provinsi

Sulawesi Tengah, yaitu Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, dan Kabupaten Tojo Una-Una. Keempat wilayah kerja ini memiliki karakteristik geografis yang bervariasi, mencakup wilayah pesisir, kepulauan, serta dataran tinggi dengan luas total mencapai lebih dari 20.000 km². Potensi sumber daya alamnya sangat besar, terutama di sektor perikanan, pertanian, perkebunan, serta industri kecil dan menengah, termasuk usaha pangan olahan rumah tangga. Masyarakat di wilayah ini umumnya memiliki pola konsumsi yang tinggi terhadap produk pangan olahan dan tradisional, serta tingkat literasi keamanan pangan yang masih perlu ditingkatkan. Kondisi ini menuntut pengawasan yang adaptif dan berbasis risiko, mengingat distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan menjangkau daerah terpencil dan kepulauan. Dalam konteks tersebut, strategi pengawasan Loka POM di Kabupaten Banggai diarahkan pada penguatan sistem pengawasan berbasis risiko, peningkatan sinergi lintas sektor, pemanfaatan teknologi informasi dalam pemantauan, serta pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat agar tercipta ekosistem pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan di wilayah kerja.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, Loka POM Banggai sebagai salah satu UPT BPOM menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
b. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
c. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
e. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
f. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
g. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;

h. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
i. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
j. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
k. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
l. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Renstra Loka POM di Kabupaten Banggai 2025-2029 menandai langkah maju dalam upaya lembaga untuk terus melindungi kesehatan dan keselamatan publik. Melalui implementasi strategi yang terencana dan terarah, Loka POM di Kabupaten Banggai bertekad untuk menghadapi tantangan masa depan dengan kepercayaan dan keunggulan, memastikan bahwa masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, berkualitas, dan efektif.

1.1.1.Capaian Kinerja Rencana Kegiatan Loka POM di Banggai Tahun 2020-2024

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
SK 1 : Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat															
IKSK 1 - Persentase obat memenuhi syarat	80,8	96,26	119,13	85,50	85,56	100,07	96,50	100	103,63	97	100	103,09	100	94,44	94,44
IKSK 2 - Persentase Makanan yang Memenuhi	78	75,00	96,15	80,00	84,04	105,05	82	95,74	116,76	84	88,46	104,52	87,9	103,18	103,18
IKSK 3 - Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87,28	86,67	99,30	88,00	83,48	94,87	89	94,59	106,29	90	100	111,11	100	93,55	93,55

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
IKSK 4 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdsarkan hasil pengawasan	66	61,54	93,23	76,00	80,62	106,08	68	93,75	137,87	70	87,50	125	87,9	65	79,95
IKSK 5 - Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat															
SK 2 : Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik															
IKSK 6 - Persentase	87	90,35	103,85	90,00	100,00	111,11	92	107	116,67	93	100	107,53	100	100	100

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan															
IKSK 7 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60,0	52,26	87,10	73,00	73,51	100,70	79	49	62,01	82	85,87	104,72	85,87	69,64	81,10
IKSK 8 - Persentase keputusan	85	100	117,65	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu															
IKSK 9 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46	7,14	15,52	50,00	64,62	129,23	55	16	29,09	60	47,83	79,72	65	44	67,69
IKSK 10 - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan	70	57,23	81,76	79,00	86,22	109,13	74	44,94	60,73	76	59,52	78,32	78	50,26	64,44

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
yang memenuhi ketentuan															
IKSK 11 - Persentase UMKM yang memenuhi standar							77	100	129,87	79	75	94,94	81	100	123,46
IKSK 12 - Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program													95	83,25	87,63

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
Pemberdayaaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota															
SK 3: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan															
IKSK 13 - Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	72,00	89,88	124,83	92,00	92,76	100,73	89,39	92,79	103,91	90,10	93,58	103,86	94,44	94,52	100,08
SK 4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan															
IKSK 14 - Persentase sampel Obat	46	50	108,70	100,00	96,50	96,50	50	50	100,80	50	50	100	50	50	100

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
yang diperiksa dan diuji sesuai standar															
IKSK 15 - Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	45	50	111,11	100,50	100,27	100,27	50	53	105	50	50	100	50	51,56	103,12
SK 5: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan															
IKSK 16 - Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di	61	63,13	103,49	80,00	100	125	98	128	130,10	99	77,50	78,28	83	88	106,02

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
bidang Obat dan Makanan															
SK 6 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal															
IKSK 17 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	100	100	82,60	82,58	99,98	100	100	100	100	100	100	100	100	100
IKSK 18 - Nilai AKIP										82,2	75,27	91,57	74,29	74,29	75,66
SK 7: Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal															
IKSK 19 - Indeks				84,00	85,30	101,51	78	83,71	107,32	79	87,62	101,91	88,21	85,71	97,17

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
Profesionalitas ASN UPT															
SK 8: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan															
IKSK 20 - Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal							2,25	1	44,44	2,5	3,0	120	3	3	100
SK 9 : Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel															
IKSK 21 - Nilai Kinerja Anggaran UPT				92,30	89,88	97,38	90,6	89,67	98,98	91,8	90,37	98,44	91,41	96,22	105,26

(Sumber : Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Banggai 2020, 2021, 2022, 2023,2024)

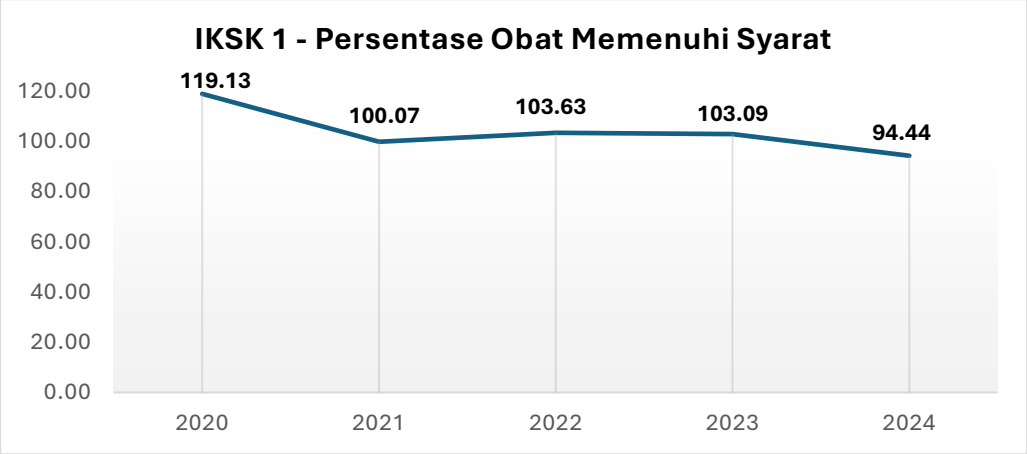
Pengukuran kinerja Loka POM di Kabupaten Banggai mengacu pada Sasaran Kegiatan yang disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Loka POM di Kabupaten Banggai dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Banggai. Dalam penyusunan sasaran kegiatan, Loka POM di Kabupaten Banggai menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam 3 perspektif, yaitu s*takeholders perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*.

Loka POM di Kabupaten Banggai memiliki 9 Sasaran Kegiatan (SK) dan 21 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK). Penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja pada setiap sasaran kegiatan sebagai berikut:

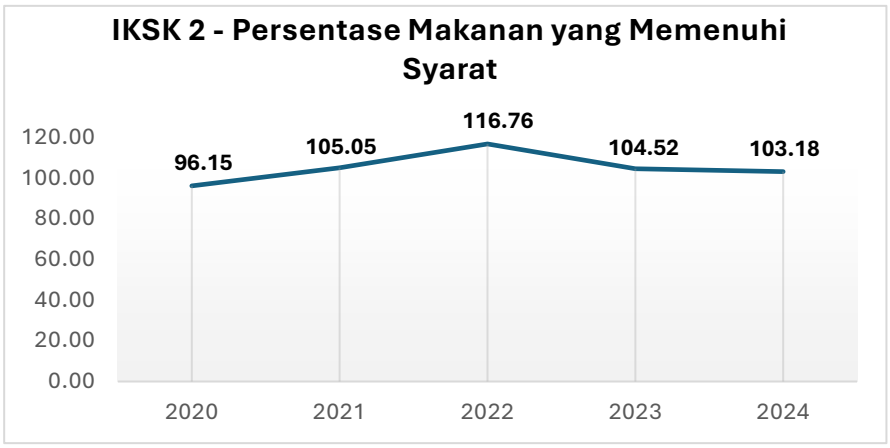
1. **Sasaran Kegiatan 1**

   Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu

   Sistem pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dilakukan BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari Standardisasi, Penilaian (*pre-market evaluation*), Pengawasan selama beredar (*post-market control*), Pengujian Laboratorium, dan Penegakan Hukum. Sasaran kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja, sebagai berikut (1) Persentase Obat yang memenuhi syarat; (2) Persentase makanan yang memenuhi syarat; (3) Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; dan (4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.



Obat yang dimaksud mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik. Persentase Obat yang memenuhi syarat paling rendah di tahun 2024 dengan capaian 94.44%. Hal ini disebabkan karena banyaknya jumlah sampel TMS pada tahap pemeriksaan (Tanpa Izin Edar (TIE)/ ilegal/ palsu, rusak, kedaluwarsa, TMK label/ penandaan). Kondisi ini terjadi karena metode sampling acak yang digunakan dapat menggambarkan kondisi real kualitas Obat beredar dimasyarakat, sehingga probabilitas hasil pemeriksaan dan pengujian sampel TMS menjadi tinggi. Peningkatan capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat disebabkan oleh mulai meningkatnya kepatuhan pelaku usaha baik dari pihak produsen dalam menerapkan cara produksi yang dapat menjamin mutu dan keamanan produk tetap memenuhi persyaratan dan penggunaan label yang memenuhi ketentuan.

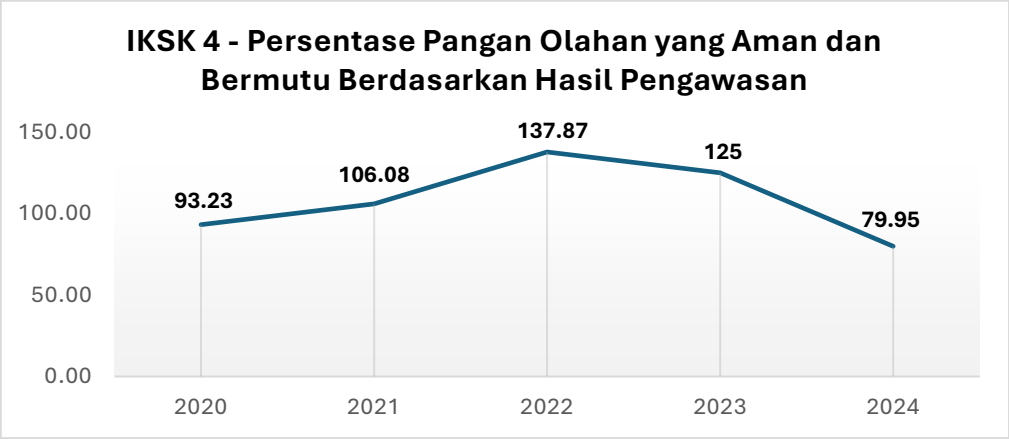


Persentase pangan olahan yang memenuhi syarat pada tahun 2020-2024 menunjukkan trend yang sangat fluktuatif. Rendahnya nilai capaian dikarenakan banyaknya sampel pangan olahan yang tidak memenuhi syarat (TMS) dan juga TMK label/penandaan.



Persentase pangan olahan yang memenuhi syarat pada tahun 2020-2024 menunjukkan trend yang sangat fluktuatif. Variasi capaian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain intensitas kegiatan pengawasan, distribusi sampel obat yang diperiksa, tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap standar mutu, serta dinamika rantai pasok obat di lapangan.

Pada tahun 2023 terdapat capaian tertinggi dengan persentase 111.11%, peningkatan persentase obat yang memenuhi standar mutu dipengaruhi oleh penguatan pembinaan kepada fasilitas pelayanan kesehatan dan pelaku usaha, serta meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya pengendalian mutu obat. Namun, pada periode lain terjadi penurunan capaian yang disebabkan oleh ditemukannya lebih banyak sampel yang tidak memenuhi syarat, termasuk obat dengan kemasan rusak, penandaan tidak sesuai, atau tidak lolos uji laboratorium.



Capaian indikator persentase Pangan Olahan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan menunjukkan dinamika yang cukup signifikan dalam tiga tahun terakhir. Tahun 2022 menjadi periode dengan capaian tertinggi dengan persentase capaian 137.87% dikarenakan efektivitas pengawasan, tingginya tingkat kepatuhan pelaku usaha pangan, serta keberhasilan pembinaan yang dilakukan secara intensif pada tahun tersebut.

Namun, capaian tersebut mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya, dengan titik terendah terjadi pada tahun 2024. Penurunan ini dipengaruhi oleh meningkatnya temuan ketidaksesuaian pada produk pangan, baik dari aspek kebersihan, penggunaan bahan tambahan pangan yang tidak sesuai, maupun perubahan pola distribusi pangan yang menimbulkan tantangan baru dalam pengawasan. Selain itu, meningkatnya volume produk yang beredar dan keterbatasan sumber daya pengawasan turut memberikan kontribusi terhadap penurunan capaian di tahun tersebut.

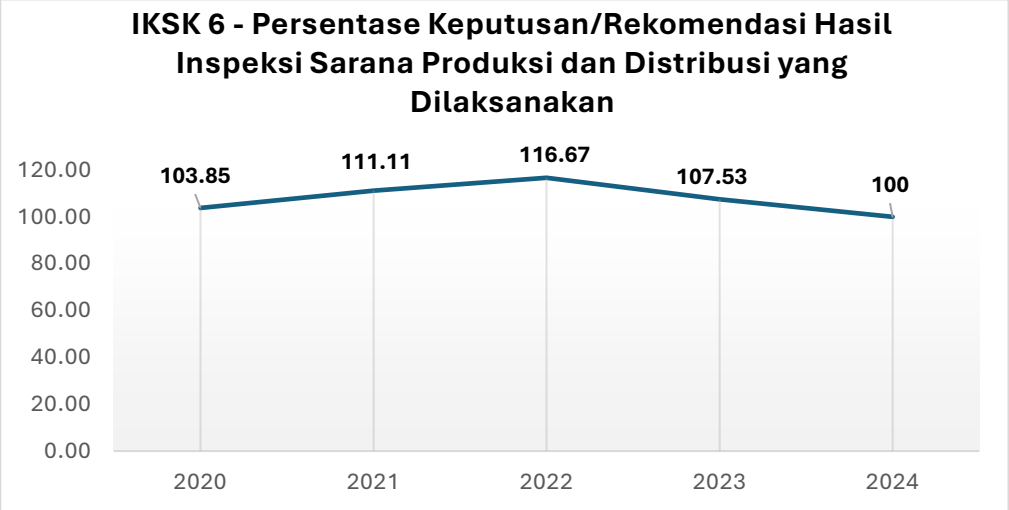
Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK 1 yaitu: a) Meningkatkan kesadaran *stakeholder* terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berkualitas melalui kampanye pada kegiatan KIE untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan; b) Meningkatkan pemberian bimbingan/pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha

dalam mematuhi pedoman/ketentuan; c). pengalokasian anggaran melalui DAK Nonfisik Subbidang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan kepada Pemerintah Daerah untuk mendorong penguatan peran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara efektif.

2. Sasaran Kegiatan 2

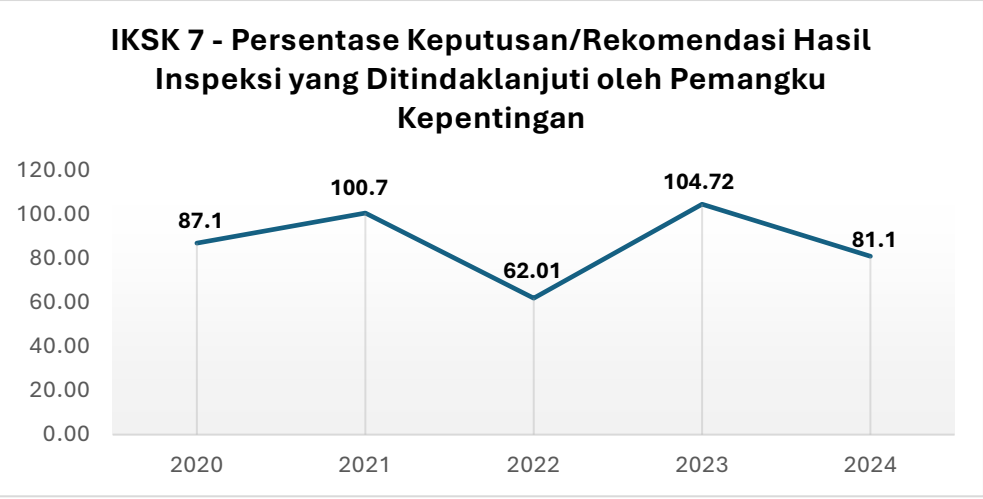
Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Serta Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat. disisi lain, masyarakat juga diharapkan berperan dalam pengawasan, sehingga perlu ditingkatkan pengetahuannya tentang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berkualitas.



Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang dikeluarkan karena pelaku usaha melakukan pelanggaran dan ketidaksesuaian penerapan antara peraturan dan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE. Tren yang meningkat pada Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan menunjukan seluruh petugas menyelesaikan laporan tindak lanjut hasil inspeksi secara tepat waktu melalui SIPT sesuai dengan pedoman tindak lanjut hasil pengawasan yang telah ditentukan.

Capaian indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan menunjukkan tren yang fluktuatif selama periode 2020–2024. Pada tahun 2024, capaian berada pada angka 100%, yang berarti seluruh rencana tindak lanjut keputusan/rekomendasi dapat diselesaikan secara tepat sesuai target. Meskipun tidak melampaui target seperti tahun-tahun sebelumnya, angka ini menandakan stabilitas kinerja dan penyelesaian yang tepat waktu.

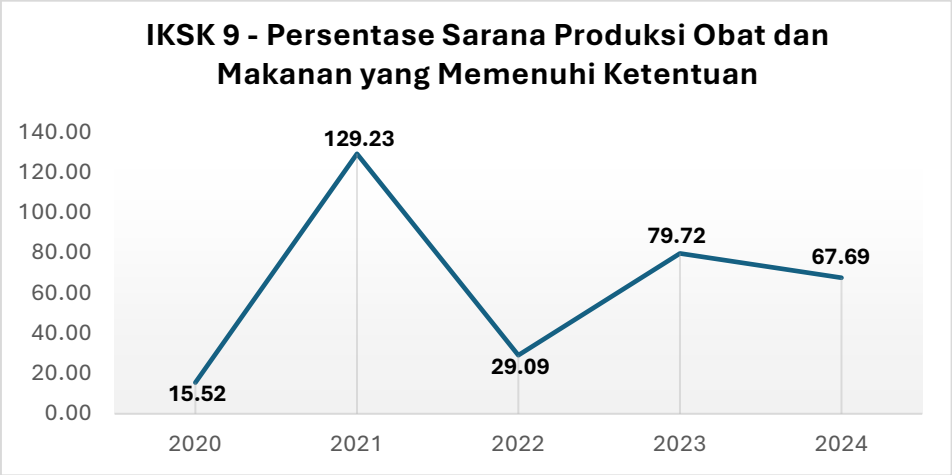


Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan untuk melakukan perbaikan terhadap

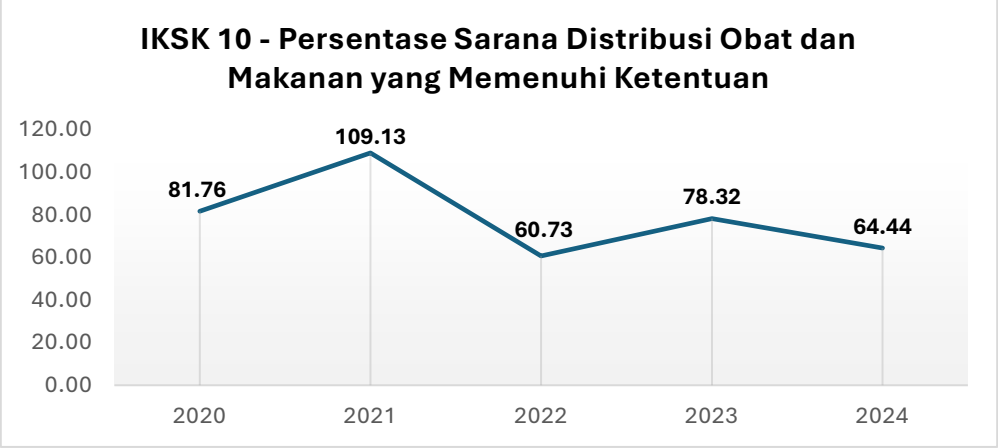
hasil temuan pemeriksaan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor. Tren yang meningkat menunjukan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Banggai dalam melakukan pembinaan kepada pelaku usaha sehingga pelaku usaha memahami cara pengisian formulir *Corrective Action & Perventif Action* (CAPA) untuk perbaikan temuan hasil dari inpeksi ke sarana dan meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam menyelesiakan seluruh perbaikan dari hasil temuan yang tertuang dalam surat tindak lanjut yang dikeluarkan oleh Loka POM di Kabupaten Banggai.



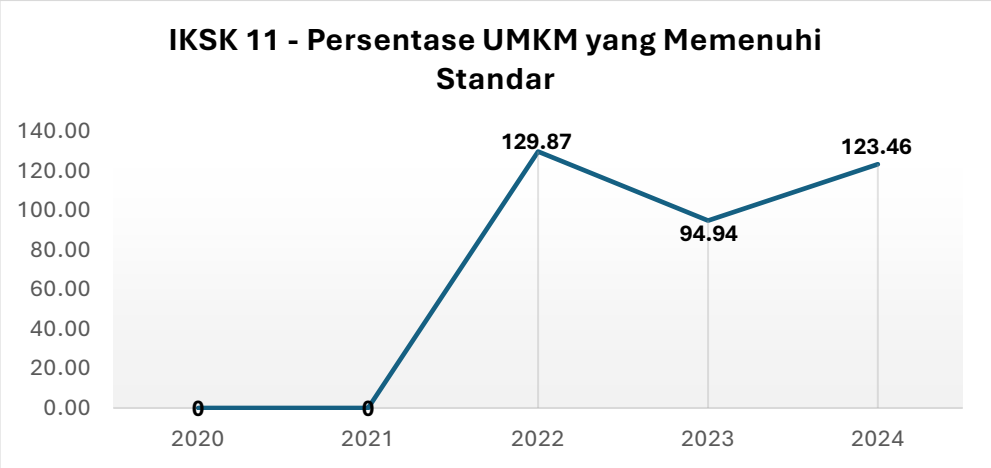
Keputusan penilaian Sertifikasi meliputi: Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2, dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk obat bahan alam, Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk Kosmetika, Rekomendasi/keputusan pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar, Hasil Pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka Sertifikasi CDOB. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu mengalami persentase capaian yang tetap sebesar 100% dari Tahun 2021-2024.



Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Yang Memenuhi Ketentuan terendah pada tahun 2022 dengan persentase capaian sebesar 29.09%. Hal ini dikarenakan sarana produksi dan UMKM cenderung tidak konsisten menerapkan Cara Produksi yang Baik karena kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk menerapkan dan melakukan perbaikan terhadap hasil pemeriksaan sarana yang telah dilakukan sebelumnya. Melalui peningkatan dan pembinaan terhadap sarana Produksi melalui pembinaan Cara Produksi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Baik secara langsung pada saat pengawasan sehingga perbaikan langsung dilakukan oleh pelaku usaha untuk dapat memenuhi ketentuan Cara Produksi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Baik serta secara berkala melakukan follow up terhadap hasil pemeriksaan yang telah dilakukan berhasil meningkatkan Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Yang Memenuhi Ketentuan terendah pada tahun 2024.



Peningkatan Pesentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Yang Memenuhi Ketentuan berhasil diperoleh dikarenakan pemeriksaan diprioritaskan kepada sarana yang terdapat temuan pada pemeriksaan tahun sebelumnya dan sarana yang belum pernah dilakukan pemeriksaan serta sarana baru sehingga terdapat peningkatan penilaian hasil pemeriksaan sarana. Peningkatan pembinaan dilakukan terhadap sarana distribusi dan memberikan surat Teguran/Peringatan kepada sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) serta berkoordinasi dengan lintas sektor di Kabupaten/Kota. Pendampingan kepada pelaku usaha dilakukan baik saat pemeriksaan berlangsung maupun saat konsultasi perbaikan CAPA, terutama untuk sarana yang baru terpapar dan belum pernah sama sekali diperiksa, sehingga terjadi peningkatan pemahaman pelaku usaha tentang cara distribusi yang baik.



Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik Yang Baik terendah pada tahun 2023. Hal ini dikarenakan terdapatnya UMKM binaan yang tidak berhasil menyelesaikan seluruh tahapan proses sertifikasi pada tahun berjalan dikarenakan komitmen dari UMKM yang masih kurang untuk memenuhi seluruh persyaratan tepat waktu.

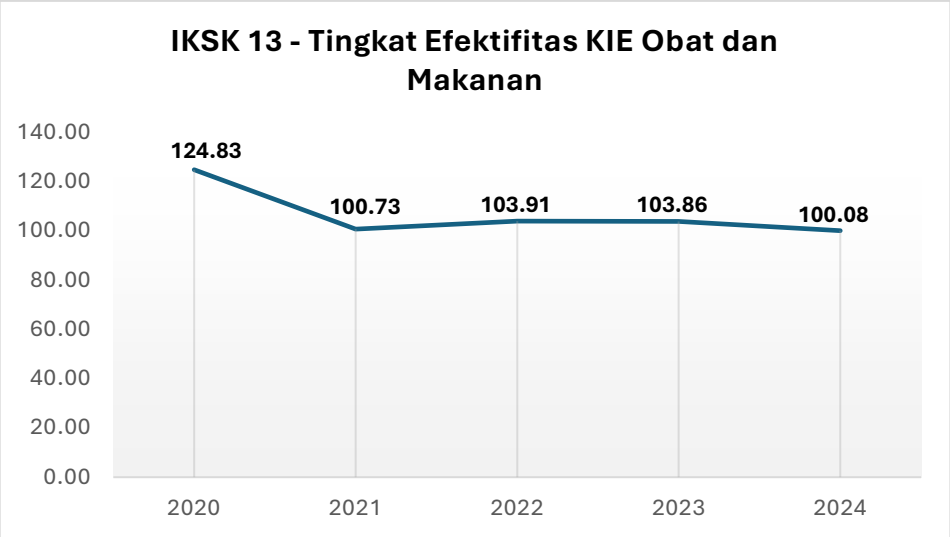


Indikator Persentase Keterlibatan UPT Dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota merupakan indikator yang dilakukan penilaian di tahun 2024.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK 2 yaitu: a) koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam pemeriksaan sarana dan produk, serta pengawasan peredaran produk daring; b) meningkatkan pemberian bimbingan/pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam mematuhi pedoman/ketentuan; c) melakukan simplifikasi dan percepatan pelayanan publik di bidang pengawasan sediaan farmasi; d) melaporkan hasil sampling dan pengujian sampel melalui SIPT secara tepat waktu dan sesuai dengan pedoman; e) meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan lintas sektor terkait tindak lanjut hasil pengawasan; f) menetapkan prioritas bersama lintas sektor untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan; g) mensosialisasikan kembali Inpres 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan kepada lintas sektor.

3. **Sasaran Kegiatan 3**

Meningkatnya Efektivitas Komunkasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan



Indikator tingkat efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan menunjukkan kinerja positif dan konsisten selama periode tahun 2020–2024. Pada tahun 2020, capaian indikator mencatat angka 124,83%, menjadi capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Hal ini mencerminkan pelaksanaan KIE yang sangat masif serta respon positif masyarakat terhadap program edukasi yang dilakukan.

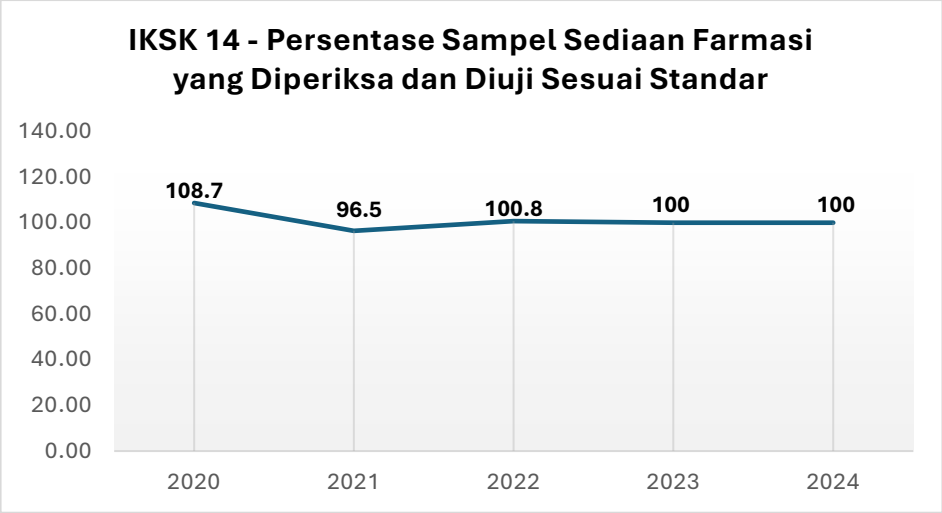
Pada tahun 2021, capaian indikator sedikit menurun namun tetap berada di atas target dengan nilai **100,73%**, menunjukkan pelaksanaan program yang stabil walaupun dihadapkan dengan kondisi pemulihan pandemi. Kinerja kembali meningkat pada tahun 2022 dengan capaian **108,91%**, didorong oleh intensifikasi kegiatan KIE baik secara langsung maupun melalui media digital.

Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian SK 3 yaitu: a) menindaklanjuti saran/masukan responden yang relevan bagi peningkatan kualitas bimbingan dan pembinaan BPOM; b) meningkatkan kegiatan public relation dan publikasi berbagai aktivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Banggai melalui berbagai

media; c) Meningkatkan engagement dengan melakukan interaksi aktif dengan pengikut pada media sosial yang dimiliki oleh masing-masing unit kerja; serta d) melakukan sosialisasi tentang layanan, menyederhanakan persyaratan, mengoptimalkan berbagai media untuk konsultasi, dan memberikan pendampingan kepada pelanggan.

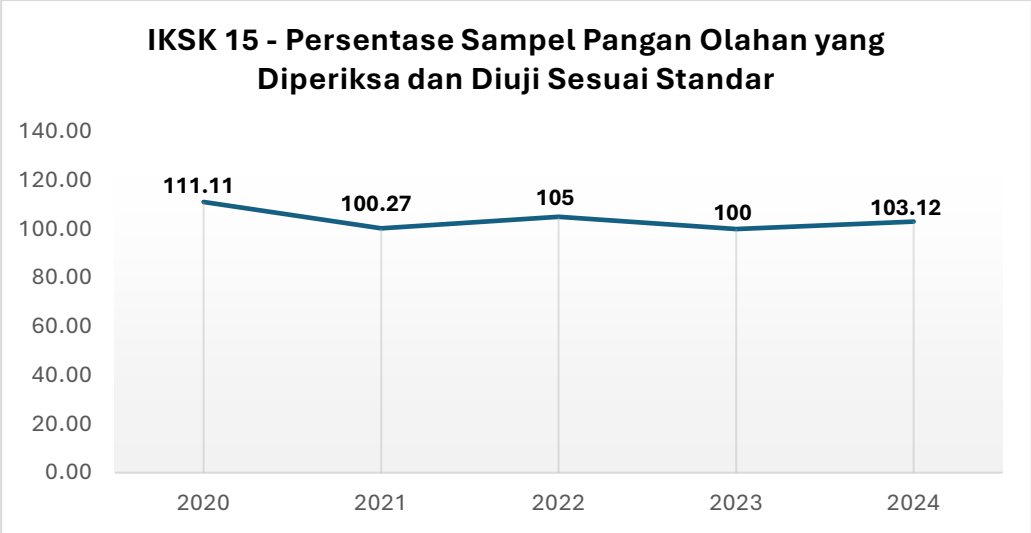
4. Sasaran Kegiatan 4

Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan



Sediaan Farmasi yang dimaksud mencakup obat, obat bahan alam, kosmetik, dan suplemen Kesehatan. Sampel sediaan farmasi meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel sediaan farmasi mencakup Balai dan Loka. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium. Loka POM di Kabupaten Banggai belum memiliki Laboratorium sendiri, sehingga pada Sasaran Kegiatan Persentase sampel sediaan farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar hanya komponen sampel sediaan farmasi yang diperiksa sesuai standar saja yang diperhitungkan dalam target dan capaiannya.

Capaian indikator persentase sampel sediaan farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan kinerja yang optimal dan konsisten. Pada kedua tahun tersebut, capaian indikator tercatat **100%**, yang berarti seluruh sampel sediaan farmasi yang masuk dalam perencanaan pengawasan telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian sesuai dengan standar mutu yang berlaku.



Sampel pangan olahan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Sediaan Farmasi mencakup Balai dan Loka. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Capaian indikator persentase sampel pangan olahan yang diperiksa dan diuji sesuai standar selama periode 2020–2024 menunjukkan kinerja yang stabil dan berada di atas target. Pada tahun 2020, capaian indikator berada pada tingkat 111,11%, menjadi capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Angka ini menunjukkan optimalisasi pelaksanaan sampling dan pengujian, meskipun pada tahun tersebut pengawasan dihadapkan pada tantangan pembatasan aktivitas akibat pandemi.

Upaya yang dilakukan untuk mendukung pencapaian SK 4 yaitu: a) evaluasi dan kajian strategi sampling dan pengujian secara berkala untuk memperluas cakupan pengawasan sehingga pengambilan sampel lebih representatif terhadap jumlah produk Sediaan Farmasi yang beredar; b) melaporkan hasil sampling dan pengujian sampel melalui SIPT secara tepat waktu dan sesuai dengan pedoman, c) meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan lintas sektor terkait tindak lanjut hasil pengawasan.

5. Sasaran Kegiatan 5

Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sasaran kegiatan Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di masing–masing wilayah kerja UPT terdiri dari satu indikator yaitu Indeks Keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.



Capaian pada indikator ini menggambarkan persentase capaian yang fluktuatif. Tahun 2022 merupakan angka tertinggi pada indikator ini dengan persentase capaian sebesar 130.10%. Hal ini karena adanya tambahan kasus yang harus ditangani sehingga mempengaruhi realisasi dan hasil capaian ditahun 2022. Adapun upaya penguatan fungsi Cegah Tangkal, Patroli Siber, Intelijen dan Peta Rawan Kasus

terlaksana dengan dibuktikan dengan pelaporan kegiatan tersebut dilaporkan pada Direktorat terkait secara rutin.

Sedangkan pada tahun 2023 mengalami penurunan persentase capaian, hal ini disebabkan Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan belum mencapai target disebabkan berkas perkara untuk target perkara ke dua baru masuk ke kejaksaan dan akan sulit dilakukan pelimpahan berkas oleh kejaksaan ke pengadilan karena Loka POM di Kab. Banggai belum memiliki akun e-berpadu sehingga pelimpahan berkas perkara harus dilakukan oleh kejaksaan. Selain itu, terdapat kendala dalam pemenuhan P19 BAP tambahan saksi pembeli yang pindah tanpa menginformasikan kepada penyidik sehingga membutuhkan waktu dalam mencari keberadaan dan posisi saksi untuk memenuhi arahan P19.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SS5 yaitu: a) advokasi Kegiatan Penyidikan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, berupa konsultasi dengan penasehat hukum/ jaksa dalam rangka penyelesaian perkara kepada UPT BPOM; b) perkuatan koordinasi lintas sektor CJS dengan berbagai kegiatan, seperti (i) FGD Perkuatan Penyidikan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (koordinasi lintas sektor); (ii) Pertemuan Perkuatan Mekanisme Operasi Penyidikan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan; (iii) Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme, dan Koordinasi PPNS BPOM; c) penambahan jumlah PPNS BPOM dengan mengadakan pelatihan pembentukan PPNS

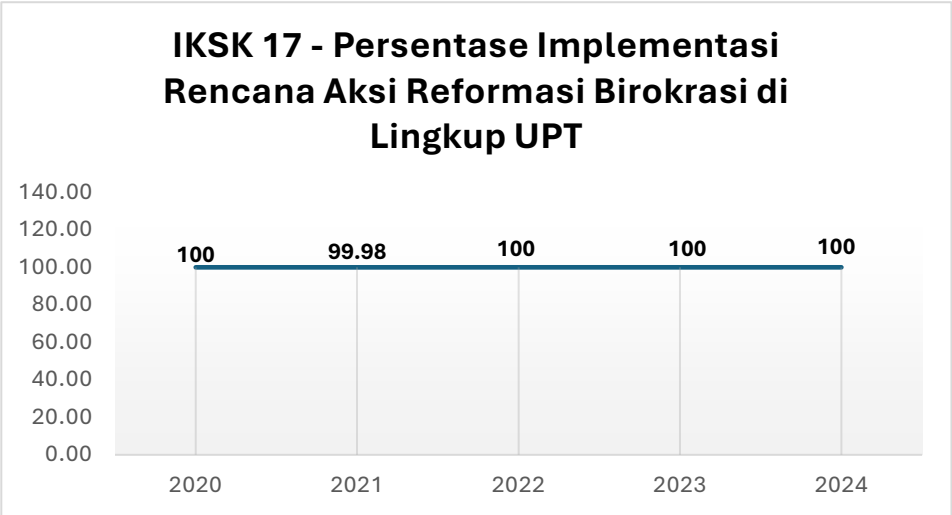
6. Sasaran Kegiatan 6

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan UPT yang Optimal

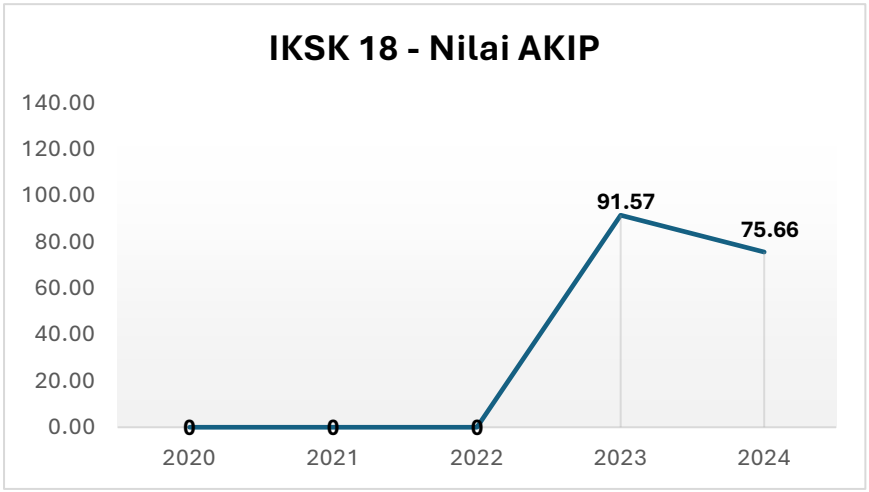
Nilai Pencapaian Sasaran untuk Sasaran Kegiatan Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal terdiri dari 2 indikator, yaitu :

a) Persentae Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di

Lingkup UPT,dan b) Nilai AKIP.



Loka POM di Kabupaten Banggai telah menyusun Rencana Aksi Implementasi Reformasi Birokrasi, terdapat 5 rencana aksi yang telah disusun dan telah terealisasi 5 rencana aksi sehingga persen capaian kegiatan indikator ini yaitu 100%. Keberhasilan capaian pada indikator ini karena adanya peran aktif tim RB Loka POM di Kabupaten Banggai yang bertugas menjalankan rencana aksi.



Indikator Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Banggai memiliki target pada Tahun 2023, sehingga realisasi dan persentase capaian dimulai pada tahun 2023. Hasil persentase capaian evaluasi SAKIP Tahun 2023 Loka POM di Kab. Banggai yaitu 75,27 masuk dalam kategori BB yang berarti Akuntabilitas kinerja loka POM di Kab. Banggai Sangat Baik, dan Akuntabel.

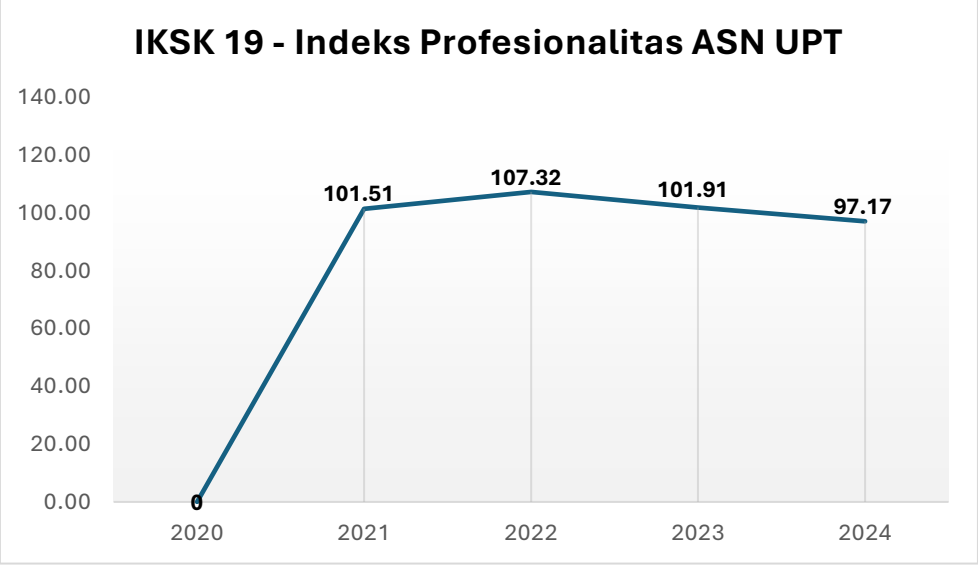
Persentase capaian yang rendah disebabkan oleh belum dibentuknya tim dalam penilaian pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE). Selain itu, PIC yang ditugaskan dalam melakukan penilaian LKE belum memahami teknis penilaian pada LKE.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK 6 yaitu: a) memastikan Rencana Aksi RB General relevan dan cukup untuk mencapai target Sasaran Kegiatan Utama; b) menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP sebagaimana tercantum pada LHE SAKIP dari Kemen-PANRB; c) monev Rencana Aksi pengelolaan pengaduan dan melaksanakan sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan pengaduan kepada masyarakat; d) Melakukan koordinasi kepada inspektorat utama dalam hal persiapan dokumen yang digunakan dalam penilaian SAKIP.

7. Sasaran Kegiatan 7

Terwujudnya SDM UPT yang Berkinerja Optimal

SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Sasaran Kegiatan ini memiliki satu indikator, yaitu : Indeks Profesinalitas ASN UPT



Indeks profesionalitas ASN UPT mulai memiliki target pada Tahun 2021, sehingga persentase capaian dimulai dari Tahun 2021. Keberhasilan pencapaian dari Tahun 2021-2023 dengan persentase capian di atas 100% dikarenakan tercapaianya seluruh jam pelajaran (JP) seluruh ASN yag mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi, baik kompetensi teknis, fungsional, maupun manajerial, sosial dan kultural.

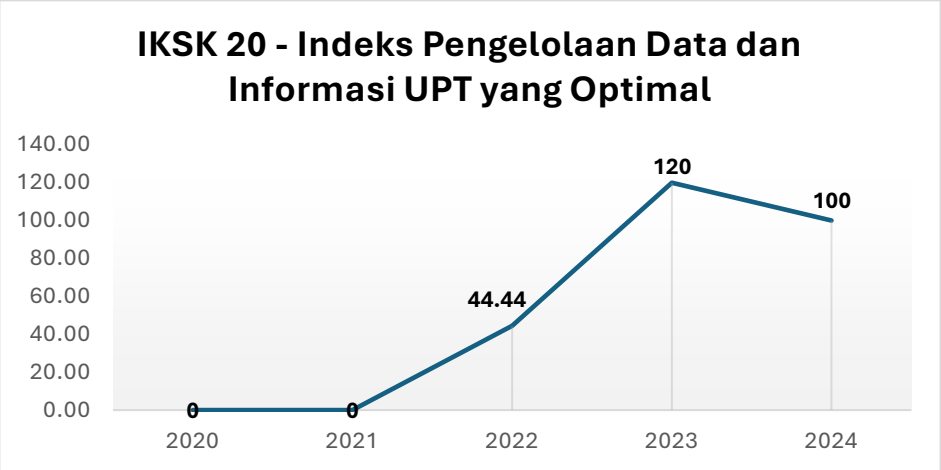
Pada Tahun 2024 mengalami penurunan capaian dengan persentase capaian sebesar 97.17%, hal ini disebabkan adanya perubahan objek penilaian IP ASN yang semula PNS menjadi PNS dan PPPK, serta perubahan instrumen bobot dasar dimensi kompetensi yang tidak hanya meliputi riwayat pengembangan kompetensi, namun juga termasuk konversi hasil penilaian kinerja.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK 7 yaitu: a) pengembangan sistem untuk memonitoring capaian pegawai di unit kerja; b) menyusun panduan jenis diklat untuk mengatasi permasalahan dalam salah kategorisasi diklat yang diinput pegawai; c) melakukan pemetaan kompetensi ASN secara berkala, sesuai Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil; d) Melaksanakan kegiatan *Feedback* Penilaian Kompetensi secara berkala per triwulan.

8. Sasaran Kegiatan 8

Menguatnya Laboratorium Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sasaran Kegiatan Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan terdiri dari satu indikator yaitu Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal.



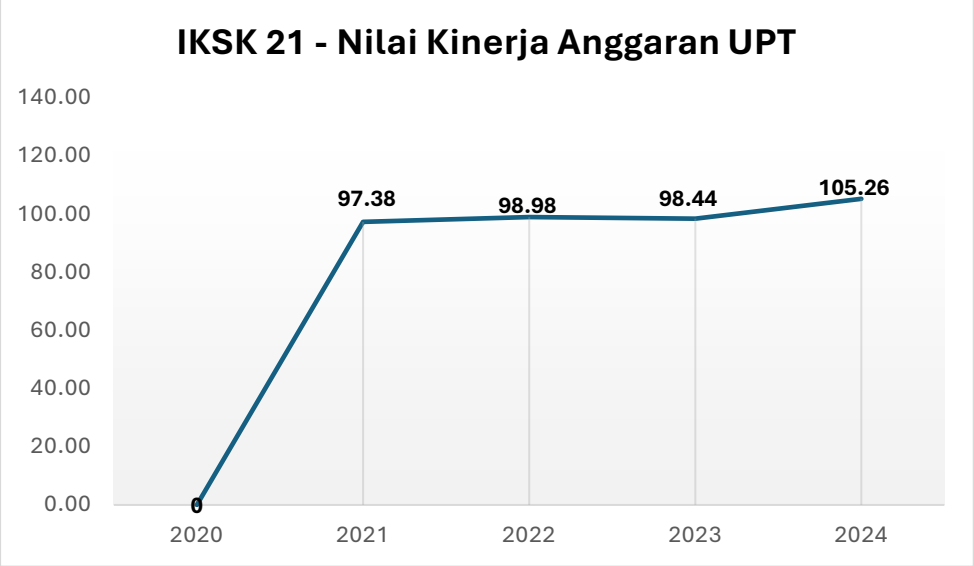
Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal di Loka POM Kabupaten Banggai mulai memiliki target pada Tahun 2022. Pada Tahun 2022 pesentase capan masih sangat rendah dengan capaian sebesar 44.44%. Hal ini disebabkan karena pegawai masih belum memanfaatkan corporate email individu dalam tugas sehari-hari secara optimal dan pemanfaatan sisten BOC masih kurang.

Namum pada Tahun setelahnya indikator ini mengalami peningkatan persentse capaian. Hal ini pegawai sudah optimal dalam memanfaatkan email corporate individu dalam tugas sehari-hari. Selain itu, pemanfaatan sistem BOC juga sudah dilakukan dengan baik dan pegawai telah memanfaatkan sistem tersebut dalam menunjang kinerja.

9. Sasaran Kegiatan 9

Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel

Di lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga sasaran kegiatan ini bertujuan untuk mengukur kemampuan Loka POM di Kabupaten Banggai dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat. Sasaran kegiatan ini memiliki satu indikator, yaitu : Nilai Kinerja Anggaran UPT.



Realisasi pada inidkator ini dimulai pada tahun 2021, sehingga persentase capaian didapatkan mulai pada tahun 2021. Pada tahun 2021-2023 capaian yang didapatkan belum mencapai 100%. Hal ini dikarenakan belum mencapai nilai maksimal pada kategoru Devisi Halaman III DIPA, belum mencapai nilai maksimal pada kategori penyerapan anggaran dan belum mencapai nilai maksimal pada kategori pengelolaan UP dan TUP.

Upaya yang dilakukan untuk mendukung pencapaian pada indikator ini, yaitu : a) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala melalui Rapat Evaluasi yang rutin dilaksanakan setiap bulan; b) Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, serta dipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA; c) Melakukan optimalisasi dan revisi anggaran untuk beberapa kegiatan yang sudah terlaksana namun masih terdapat sisa anggaran.

1.1.2 Aspirasi Stakeholder

Dalam menghadapi tantangan masa depan, Loka POM di Kabupaten Banggai memahami pentingnya upaya memperkuat pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan untuk menjaga kesehatan masyarakat.

Penyusunan Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Banggai tidak hanya berorientasi pada pemenuhan target kinerja internal, tetapi juga

memperhatikan kebutuhan, harapan, dan aspirasi para stakeholder yang berperan langsung maupun tidak langsung dalam sistem pengawasan Obat dan Makanan. Stakeholder yang dimaksud meliputi pemerintah daerah, fasilitas distribusi dan produksi Obat dan Makanan, fasilitas pelayanan kesehatan, pelaku usaha pangan, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, serta masyarakat sebagai penerima manfaat utama layanan pengawasan.

Secara umum, para stakeholder menyampaikan aspirasi agar Loka POM di Kabupaten Banggai dapat memperkuat fungsi pengawasan secara lebih komprehensif, responsif, dan adaptif terhadap dinamika peredaran Obat dan Makanan di wilayah kerja. Pemerintah daerah mengharapkan kolaborasi lintas sektor yang lebih erat dalam pelaksanaan kebijakan pengawasan, terutama dalam harmonisasi program pembangunan daerah dengan agenda nasional perlindungan konsumen. Pelaku usaha dan fasilitas pelayanan kesehatan mengharapkan adanya pendampingan, bimbingan teknis, dan sosialisasi peraturan yang lebih intensif agar kepatuhan terhadap standar keamanan, mutu, dan gizi produk dapat meningkat secara berkelanjutan.

Di sisi lain, lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat menyampaikan aspirasi terkait peningkatan edukasi publik, literasi keamanan pangan, dan upaya pencegahan penyalahgunaan obat di masyarakat. Masyarakat sebagai pengguna akhir layanan berharap layanan informasi terkait Obat dan Makanan dapat diakses dengan mudah, cepat, dan akurat, serta pelaksanaan penindakan terhadap produk ilegal dapat dilakukan secara tegas untuk memberikan rasa aman dalam konsumsi sehari-hari.

Aspirasi tersebut menjadi landasan penting bagi Loka POM di Kabupaten Banggai dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pada periode Renstra. Melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan kolaborasi lintas sektor, intensifikasi pembinaan pelaku usaha, serta perluasan edukasi dan advokasi kepada masyarakat, diharapkan Loka POM di Kabupaten Banggai dapat semakin memperkuat peran sebagai

institusi pelindung masyarakat di bidang Obat dan Makanan serta memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan kesehatan di daerah.

Aspirasi masyarakat juga membantu Loka POM di Kabupaten Banggai dalam memahami bagaimana perubahan lingkungan strategis, seperti perkembangan teknologi digital dan perubahan demografis, dapat mempengaruhi pola konsumsi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Hal ini penting agar Loka POM di Kabupaten Banggai dapat menyesuaikan kebijakan dan mekanisme pengawasan untuk tetap relevan dan efektif.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam menyusun Renstra Loka POM di Kabupaten Banggai 2025-2029, memahami potensi dan permasalahan yang dihadapi menjadi kunci dalam merancang strategi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak hanya berkualitas dan efektif, tapi juga responsif terhadap dinamika kesehatan global dan nasional. Loka POM di Kabupaten Banggai, sebagai institusi yang bertanggung jawab atas keamanan, efikasi, dan mutu produk kesehatan dan pangan di Indonesia, berada di garis depan dalam menghadapi tantangan yang kompleks dan mengemban tanggung jawab besar dalam melindungi kesehatan publik. Tantangan ini termasuk mengatasi ancaman kesehatan yang muncul (*emerging diseases*), yang memerlukan kesiapsiagaan dan responsivitas sistem pengawasan yang tinggi.

Dalam lima tahun ke depan (2025-2029), Loka POM di Kabupaten Banggai menghadapi serangkaian potensi dan permasalahan yang kompleks. Sebagai langkah strategis dalam penyusunan perencanaan lima tahun yang akan datang, analisis SWOT merupakan pendekatan fundamental untuk memetakan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh Loka POM di Kabupaten Banggai periode 2025-2029. Melalui pendekatan ini, dapat diidentifikasi secara komprehensif kekuatan dan kelemahan internal Loka POM di Kabupaten Banggai, serta peluang dan ancaman eksternal yang berpengaruh, untuk merumuskan strategi yang akan

memaksimalkan potensi dan mengatasi permasalahan dalam menjaga keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan untuk masyarakat.

1.2.1.Kekuatan (*Strength*)

Analisis kondisi internal organisasi dengan tujuan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Banggai, dapat membantu memahami dan mengevaluasi sumber daya, kapabilitas, dan aspek strategis yang memberikan Loka POM di Kabupaten Banggai keunggulan dalam menjalankan tugas pengawasannya. Identifikasi kekuatan ini tidak hanya vital dalam mempertahankan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, tetapi juga esensial dalam merencanakan pengembangan strategis yang akan memperkuat posisi Loka POM di Kabupaten Banggai di masa depan. Berikut ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh Loka POM di Kabupaten Banggai, yang merupakan aset penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya:

1. **Komitmen kepemimpinan yang kuat**

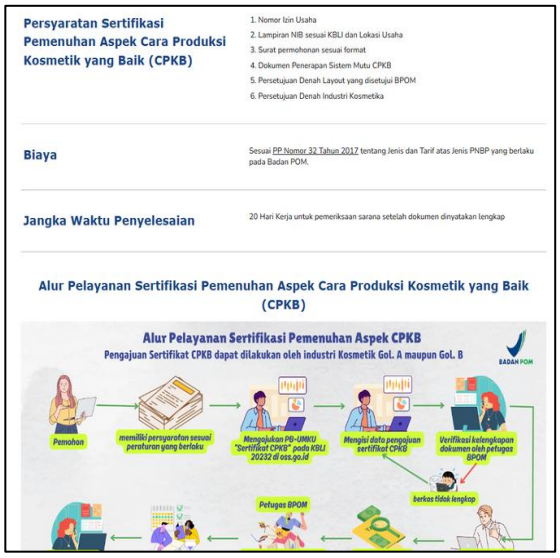
   Dalam membangun fondasi yang kuat untuk keberhasilan dan keefektifan jangka panjang, kepemimpinan di Loka POM di Kabupaten Banggai telah memperlihatkan komitmen yang kuat dan visioner terhadap pencapaian visi dan misi organisasi. Kepemimpinan yang strategis, progresif dan inovatif sangat penting dalam memastikan Loka POM di Kabupaten Banggai mampu menavigasi lingkungan yang terus berubah dengan kompleksitas dan dinamika yang meningkat. Dengan fokus pada pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan berkualitas, kepemimpinan memastikan Loka POM di Kabupaten Banggai tidak hanya beradaptasi dengan tantangan saat ini tetapi juga proaktif mengantisipasi perubahan di masa depan.

   Melalui penerapan strategi yang matang dan pengambilan keputusan yang bijaksana, kepemimpinan Loka POM di Kabupaten Banggai berusaha meningkatkan Komunikasi Informasi dan Edukasi, pengawasan serta memperkuat sistem pengawasan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Inovasi yang lahir karena penerapan strategi

yang telah dilakukan dalam kepemimpinan Loka POM Banggai ialah dalam Forum Pelayanan Publik yang menghasilkan Inovasi-Inovasi Pelayanan Publik, antara lain Sarana Akses Layanan Masyarakat (SALAM) dan Saluran unutk Aspirasi dan Respon Aduan (SUARA POM). Sarana akses layanan masyarakat (SALAM) merupakan sebuah wadah akses layanan informasi yang dapat diakses dengan mudah sehingga memudahkan masyarakat dalam mendapatan informasi seperti tata cara registrasi produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan khusunya untuk wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banggai.

Gambar 1.1 Sarana Akses Layanan Masyarakat (SALAM)





Saluran untuk Aspirasi dan Respon Aduan (SUARA POM) merupakan sistem penyampaian PENGADUAN dan APRESIASI dari masyarakat/pelaku usaha/pihak lainnya yang termasuk internal Loka POM di Kabupaten Banggai berbasis digital yang dirancang untuk menampung keluhan, apresiasi, aspirasi, saran, maupun laporan dugaan pelanggaran oleh Petugas Loka POM di Kabupaten Banggai yang disampaikan secara aman dan rahasia.

Gambar 1.2 Saluran untuk Aspirasi dan Respon Aduan (SUARA POM)



SUARA POM BANGGAI
SUARA POM
SALURAN UNTUK ASPIRASI DAN RESPON ADUAN

2. Kerja sama lintas sektor dan jaringan kerja sama yang solid

Loka POM di Kabupaten Banggai telah membangun dan memelihara kolaborasi strategis dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, Akademisi, Pelaku Usaha, Komunitas dan Media Massa. Kerja sama ini memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan akurat, yang secara signifikan meningkatkan kemampuan Loka POM di Kabupaten Banggai dalam mengawasi produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang beredar. Melalui kerja sama dengan berbagai *stakeholder*, Loka POM di Kabupaten Banggai dapat memastikan bahwa regulasi dan kebijakan yang diterapkannya tidak hanya sesuai dengan standar global tetapi juga relevan dengan konteks lokal, memperkuat sistem pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Tabel 1.3 Daftar Mitra Kerjasama Loka POM di Kabupaten Banggai Satu Tahun Terakhir

Mitra Kerjasama	Nama Kerjasama	Tanggal Penetapan Kerjasama
Dinas PMPTSP Kabupaten Banggai	Nota Kesepakatan tentang Sinergi Penyelenggaraan Pelayanan di Mal	20 November 2023

Mitra Kerjasama	Nama Kerjasama	Tanggal Penetapan Kerjasama
	Pelayanan Publik di Kabupaten Banggai	
Bag. Hukum Kantor Bupati Banggai	SK TKPPOM (Tim Koordinasi Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan)	26 November 2024
Dinas P2KB Kabupaten Banggai	SK TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting)	18 Maret 2024
Dinas Kesehatan Banggai Laut	SK TKPPOM (Tim Koordinasi Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan)	16 Agustus 2024
Dinas P2KB	SK TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting)	23 November 2022
	SK TKPPOM (Tim Koordinasi Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan)	
	SK TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting)	
Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una-Una	PKS Tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu	10 Oktober 2024
	SK TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting)	

Mitra Kerjasama	Nama Kerjasama	Tanggal Penetapan Kerjasama
Fakultas Kesehatan Masyarakat	Pendidikan dan pengabdian masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan	28 Februari 2025
	Pendidikan dan pengabdian masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan	

(Sumber data : Database Infokom Loka POM di Kab. Banggai)

Kerja sama lintas sektor dan jaringan kerja sama yang efektif ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, tetapi juga memperkuat kapasitas Loka POM di Kabupaten Banggai dalam menanggapi tantangan kesehatan masyarakat yang muncul, dan memastikan perlindungan yang lebih baik bagi kesehatan masyarakat.

3. Pengalaman dan kompetensi teknis sumber daya manusia

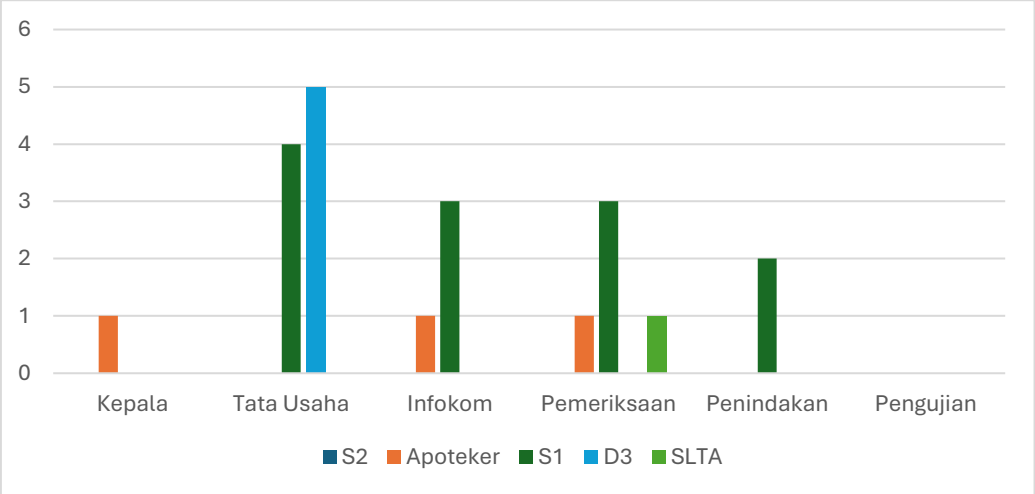
Loka POM di Kabupaten Banggai didukung oleh para profesional yang menunjukkan dedikasi dan komitmen tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, dengan tujuan utama menjaga keamanan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan bagi masyarakat. Dengan pengetahuan teknis mendalam dan keterampilan analitis yang modern, kualitas sumber daya manusia di Loka POM di Kabupaten Banggai mencerminkan standar tinggi di bidangnya.

Jumlah Sumber Daya Manusia Loka POM di Kabupaten Banggai per 01 Juli 2025 sebanyak 22 ASN, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.3 Jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Banggai

No.	Jabatan	Jumlah Pegawai
1	Kepala Loka POM di Kabupaten Banggai	1
2	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	8
3	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	2
4	Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia	1
5	Penata Kelola Obat dan Makanan	1
6	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	3
7	Arsiparis Terampil	1
8	Perencana Ahli Pertama	1
9	Pranata Komputer Terampil	2
10	Pranata Sumber Daya Manusia Terampil	1
11	Penata Laksana Barang Terampil	1
Jumlah Pegawai Loka Banggai		22

Klasifikasi Pegawai ASN Menurut Strata Pendidikan



Dari diagram di atas diketahui bahwa berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai ASN Loka POM di Kabupaten Banggai terdiri dari 3 orang apoteker, 12 orang sarjana, 5 orang Diploma Tiga dan 1 orang SLTA.

Dengan masifnya kegiatan peningkatan sensitivitas gender yang dilakukan sejak pertengahan tahun 2022 hingga akhir 2024 serta telah dibuatnya media pembelajaran e-Learning Pengarusutamaan Gender, semakin banyak pegawai baik di level pimpinan dan staf di seluruh fungsi yang memiliki pemikiran yang responsif gender. Pemikiran yang responsif gender akan mendukung pelaksanaan pengarustamaan gender yang merupakan salah satu mainstreaming dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Harapannya, dengan seiring berjalannya waktu mulai dari penyusunan kebijakan untuk internal dan eksternal, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantuan, evaluasi, pelaporan dan pengawasan kegiatan diharapkan dapat semakin mengurangi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

4. Pemanfaatan teknologi dan inovasi

Digitalisasi proses kerja Loka POM di Kabupaten Banggai telah merevolusi cara lembaga ini beroperasi dan berinteraksi dengan *stakeholder*. Implementasi sistem informasi manajemen yang terintegrasi, penggunaan aplikasi mobile untuk pemantauan dan pelaporan, serta pengembangan *platform online* untuk registrasi dan sertifikasi produk, semua memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan proses yang lebih transparan, efisien, dan mudah diakses oleh publik. Digitalisasi ini tidak hanya mempercepat proses pengawasan dan pengujian, tetapi juga mempermudah komunikasi dan kolaborasi antara Loka POM di Kabupaten Banggai, industri, dan masyarakat.

5. Edukasi dan pemberdayaan masyarakat

Loka POM di Kabupaten Banggai aktif dalam mengedukasi dan melibatkan masyarakat dalam isu keamanan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Dengan melaksanakan program dan kampanye edukasi yang terstruktur, Loka POM di Kabupaten Banggai berupaya menyampaikan informasi penting kepada publik dan menginspirasi partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengawasi produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Keterlibatan ini memainkan peran strategis dalam menguatkan sistem pengawasan dari dalam, sambil membangun kesadaran dan pemahaman luas mengenai pentingnya mengkonsumsi produk yang aman dan berkualitas. Dengan demikian, pendekatan edukasi dan pemberdayaan ini mengajak masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam mendukung inisiatif kesehatan publik, mengkontribusi pada terciptanya lingkungan yang aman dan sehat bagi semua.

Masyarakat merupakan satu elemen utama dalam sistem pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Keterlibatan masyarakat dalam sistem pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan tidak hanya meningkatkan efektivitas upaya pengawasan oleh Loka POM di Kabupaten Banggai, tetapi juga mengukuhkan jaringan keamanan produk secara menyeluruh.

Melalui edukasi dan pemberdayaan, masyarakat menjadi lebih sadar dan peduli terhadap kualitas serta keamanan produk yang mereka gunakan, mendorong perilaku konsumsi yang bertanggung jawab.

Gambar 1.3 Jumlah Peserta Kegiatan KIE Keliling Loka POM di Kabupaten Banggai Tahun 2021-2025



Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan produk yang mencurigakan atau tidak memenuhi standar sangat membantu Loka POM di Kabupaten Banggai dalam mengidentifikasi dan menanggapi potensi risiko kesehatan masyarakat dengan lebih cepat dan efektif. Kemitraan strategis ini antara masyarakat dan Loka POM di Kabupaten Banggai merupakan aspek penting dalam memastikan keamanan produk untuk kesejahteraan semua orang.

6. **Kemampuan adaptasi dengan perkembangan terkini**

Kemampuan adaptasi dengan perkembangan terkini mencerminkan bagaimana Loka POM di Kabupaten Banggai secara proaktif dan responsif memperbarui standar dan metodologi pengawasannya untuk menjawab tantangan yang ditimbulkan oleh dinamika lingkungan strategis dan perkembangan sains dan teknologi. Dengan memastikan bahwa regulasi dan prosedur pengawasan selaras dengan perkembangan terbaru dalam industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, Loka POM di Kabupaten Banggai dapat menjalankan tugasnya

dengan lebih efektif, menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat, serta mendukung inovasi industri.

Sejalan dengan amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, agar Pemerintah melakukan pengendalian konsumsi gula, garam dan lemak dalam rangka menurunkan prevalensi penyakit tidak menular. Loka POM di Kabupaten Banggai mendukung tersedianya pangan olahan yang sehat melalui dukungan terhadap kebijakan pencantuman informasi gizi pada bagian depan label/Front of Pack Nutrition Labelling (FOPNL) guna menekan faktor risiko terjadinya penyakit tidak menular dari pola konsumsi yang salah. Dengan demikian diharapkan kebijakan yang disusun dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Selain itu, Loka POM di Kabupaten Banggai meningkatkan kemampuan adaptasinya melalui pengembangan sumber daya manusia, penerapan teknologi terkini dalam pengawasan, serta memperkuat kolaborasi dengan lembaga dan pemangku kepentingan industri. Langkah-langkah ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan, tetapi juga memposisikan Loka POM di Kabupaten Banggai sebagai lembaga yang tangguh dan dinamis, siap menghadapi tantangan masa depan. Kemampuan adaptasi ini membuktikan komitmen Loka POM di Kabupaten Banggai dalam melindungi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan industri, menjadikannya kekuatan penting dalam membangun sistem pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan berkelanjutan.

7. Infrastruktur pelayanan publik yang memadai

Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Banggai, infrastruktur pelayanan publik disediakan guna menunjang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Infrastruktur

pelayanan publik Loka POM di Kabupaten Banggai meliputi gedung kantor serta sarana prasarana pendukungnya. Gedung kantor Loka POM di Kabupaten Banggai yang berada di Kabupaten Banggai, yang memiliki peranan penting dalam mendukung operasional Loka POM di Kabupaten Banggai secara keseluruhan, dan berfungsi sebagai sarana koordinasi dan pengambilan keputusan strategis.

Selain keberadaan gedung kantor, sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik yang memadai juga berperan penting untuk memastikan pelaksanaan fungsi Loka POM di Kabupaten Banggai dilakukan dengan optimal. Sarana dan prasarana penunjang yang dimaksud, meliputi loket pelayanan publik milik unit kerja yang ada di Loka POM di Kabupaten Banggai, ruang bermain anak, ruang laktasi, toilet ramah disabilitas, kendaraan operasional dinas, fasilitas perkantoran termasuk di dalamnya mebel, dan media informasi digital (videotron).

Loka POM di Kabupaten Banggai juga hadir untuk memberikan Pelayanan Publik pada Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Banggai. Pada tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Banggai akan melakukan pelayanan publik di MPP Kabupaten Banggai Kepulauan selain yang ada di Kabupaten Banggai. MPP Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Banggai Laut akan menyusul dan mereka sementara dalam persiapan dan pembenahan.

1.2.2.Kelemahan *(Weakness)*

Dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang terus meningkat, Loka POM di Kabupaten Banggai tidak terlepas dari adanya area yang memerlukan perhatian dan peningkatan. Aspek-aspek tertentu dalam operasionalnya menunjukkan kelemahan yang berpotensi mempengaruhi efektivitas dan efisiensi Loka POM di Kabupaten Banggai menjalankan tugas dan fungsinya. Mengidentifikasi dan memahami kelemahan-kelemahan ini merupakan langkah awal yang kritis untuk memperkuat kinerja Loka POM

di Kabupaten Banggai dalam upaya melindungi masyarakat dari risiko produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang tidak aman. Berikut ini adalah kelemahan *(weakness)* yang dimiliki oleh Loka POM di Kabupaten Banggai, yang merupakan area yang memerlukan perhatian dan peningkatan.

1. **Keterbatasan sumber daya manusia**

   Keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang dihadapi Loka POM di Kab. Banggai dibanding dengan luas cakupan wilayah pengawasan termasuk daerah kepulauan berdampak langsung pada kemampuan lembaga ini untuk menjalankan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif dan menyeluruh, terutama di wilayah-wilayah kepulauan yang memiliki banyak titik lokasi, terpencil atau kurang terjangkau. Kelemahan ini meningkatkan risiko terjadinya penundaan dalam inspeksi dan pengawasan produk, memungkinkan produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas beredar lebih lama di pasar dan bahkan sudah habis dikonsumsi. Berikut analisis beban kerja, eksisting pegawai Tahun 2025 dan proyeksi pegawai Tahun 2027 Loka POM di Kabupaten Banggai:

Tabel 1.4. Analisis Beban Kerja Loka POM di Kabupaten Banggai

No	Jabatan	Analisis Beban Kerja (ABK)	Eksisting Pegawai 2025	Proyeksi Pegawai 2027
1	Kepala Kantor	1	1	1
2	Pengelola Keuangan	3	3	3
3	Pranata Komputer Mahir dan Terampil	2	2	2
4	Arsiparis	2	1	2
5	Perencana Ahli Muda dan Pertama	1	1	1

No	Jabatan	Analisis Beban Kerja (ABK)	Eksisting Pegawai 2025	Proyeksi Pegawai 2027
6	Pranata SDM Aparatur Mahir dan Terampil	1	1	1
7	Penata Laksana Barang Terampil	1	1	1
8	Pengawas Farmasi dan Makanan	17	11	17
Jumlah		28	21	28

(Sumber data : Lampiran surat perencanaan ABK 2025 s/d 2027)

2. Infrastruktur transportasi dan logistik yang terbatas

Wilayah kepulauan memerlukan moda transportasi khusus, seperti kapal atau perahu, yang tidak selalu tersedia secara terjadwal. Biaya transportasi untuk menjangkau wilayah kepulauan lebih tinggi, sehingga membatasi frekuensi kunjungan pengawasan. Kendala cuaca ekstrem, seperti gelombang tinggi, sering menghambat akses ke wilayah kepulauan. Anggaran transportasi untuk menjangkau wilayah-wilayah di kepulauan perlu ditingkatkan.

3. Aksesibilitas informasi dan komunikasi dan kompleksitas sosial dan budaya

Wilayah kepulauan sering kali memiliki jaringan komunikasi yang lemah atau tidak stabil, sehingga menyulitkan koordinasi dan pelaporan. Edukasi masyarakat di kepulauan terkait pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan tidak optimal akibat keterbatasan akses informasi, kurangnya pemahaman masyarakat di wilayah kepulauan tentang pentingnya pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Adanya perbedaan budaya dan kebiasaan yang memengaruhi penerimaan terhadap regulasi atau edukasi dari Loka POM.

4. Sarana dan prasana belum memadai

Sarana dan prasarana yang belum memadai menjadi kendala utama dalam pelaksanaan kegiatan. Keterbatasan ini dapat menghambat efektivitas program yang dijalankan, menyebabkan kurangnya kenyamanan bagi peserta, serta berpotensi menurunkan kualitas hasil yang diharapkan. Selain itu, kondisi ini juga dapat berpengaruh terhadap efisiensi kerja tim, mengurangi optimalisasi sumber daya, dan memperpanjang waktu penyelesaian tugas.

Kondisi sarana dan prasarana Loka POM di Kabupaten Banggai masih tergolong terbatas dan belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara optimal. Fasilitas kantor yang tersedia belum memiliki ruang yang memadai untuk mendukung kegiatan operasional, seperti tempat penyimpanan dokumen, pengelolaan data, serta pelayanan publik. Peralatan kerja seperti perangkat komputer, jaringan internet, kendaraan operasional, dan alat pendukung pengawasan lapangan juga belum memenuhi standar ideal untuk menjangkau seluruh wilayah kerja yang luas dan tersebar hingga ke wilayah kepulauan.

Selain itu, belum tersedianya laboratorium pengujian membuat proses pemeriksaan sampel harus dikirim ke UPT BPOM lainnya yang memerlukan waktu dan biaya tambahan. Kondisi ini berpotensi menunda tindak lanjut terhadap hasil pengawasan/temuan produk yang diduga tidak memenuhi persyaratan.

1.2.3. Peluang *(Opportunity)*

Komponen peluang (*opportunity*) dalam SWOT merefleksikan prospek strategis untuk memperkuat efektivitas dan meningkatkan cakupan layanan dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Mengeksplorasi peluang juga dapat membuka jalan bagi Loka POM di Kabupaten Banggai untuk memposisikan dirinya sebagai lembaga pengawas yang proaktif dan inovatif, meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memastikan bahwa Indonesia tetap sejalan dengan

standar global dalam pengawasan keamanan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Berikut ini adalah peluang yang dimiliki oleh Loka POM di Kabupaten Banggai untuk memperluas dan memperkuat perannya di bidang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:

1. **Kolaborasi dengan *stakeholders***

   Peluang Loka POM di Kabupaten Banggai untuk mengembangkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti industri farmasi dan pangan olahan dan institusi akademik. Hubungan kerja sama ini memungkinkan pertukaran informasi dan praktik terbaik, yang secara langsung dapat meningkatkan kemampuan Loka POM di Kabupaten Banggai dalam memahami dan mengimplementasikan standar industri global serta tren terkini. Kemitraan dengan universitas dapat memfasilitasi penelitian bersama yang menghasilkan wawasan baru tentang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, sementara kolaborasi dengan lembaga internasional dapat membantu Loka POM di Kabupaten Banggai menyelaraskan regulasinya dengan standar global, memastikan bahwa Indonesia tidak tertinggal dalam praktik pengawasan kesehatan publik.

   Secara strategis, kolaborasi ini memiliki implikasi yang jauh mencakup lebih dari sekadar pertukaran pengetahuan. Kolaborasi ini mengarah pada pembentukan aliansi strategis yang dapat mendukung inisiatif kebijakan Loka POM di Kabupaten Banggai, termasuk advokasi untuk peraturan yang lebih ketat terhadap bahan berbahaya dalam Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, atau kebijakan yang mendukung pengembangan industri farmasi dan pangan olahan dalam negeri. Kolaborasi ini juga membuka peluang bagi Loka POM di Kabupaten Banggai untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas internalnya melalui pelatihan yang disediakan oleh mitra-mitra global. Adapun beberapa kolaborasi yang telah terealisasi dengan *stakeholders* antaralain, pembuatan kesepakatan tentang sinergi penyelanggaraan pelayanan di Mal Pelayanan Publik dengan Dinas PMTSP, tentang percepatan penurunan *stunting* dengan Dinas P2KB, Dinkes

Kabupaten Tojo Una-Una dan Universitas Tompotika Luwuk mengenai pendidiakan dan pengabdian masyarakat di bidang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

2. **Peningkatan jumlah dan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia**

   Dalam upaya meningkatkan jumlah dan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia (SDM), terdapat peluang besar yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung keberhasilan tujuan organisasi. Peningkatan kompetensi melalui pelatihan berkala, pemanfaatan media pembelajaran *e-learning* termasuk PUG, *knowladge sharing* internal memberikan kesempatan untuk membangun SDM yang lebih profesional dan berkualitas, sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

   Memaksimalkan potensi tenaga kerja produktif dengan mendorong inovasi dan integritas membuka jalan untuk menciptakan budaya kerja yang adaptif, kreatif, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, Loka POM di Kabupaten Banggai juga proaktif dalam menyusun dan mengajukan dokume Analisis Kebutuhan Pegawai dan usulan SDM yang spesifik kepada BPOM Pusat, dengan memanfaatkan peluang-peluang ini, organisasi dapat meningkatkan daya saing, memberikan layanan yang lebih baik, dan mencapai tujuan strategis secara berkelanjutan.

3. **Adaptasi Dengan Perkembangan Teknologi Melalui Peningkatan Digitalisasi**

   Adaptasi terhadap perkembangan teknologi baru meningkatkan kapasitas Loka POM di Kabupaten Banggai untuk beroperasi sebagai lembaga pengawasan yang dinamis dan adaptif. Dalam konteks global, kecepatan dan akurasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan menjadi kunci kompetitif yang penting, dan dengan teknologi yang tepat, Loka POM di Kabupaten Banggai dapat menegakkan standar yang lebih tinggi, memberikan respons yang lebih cepat

terhadap masalah keamanan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, dan bahkan mengantisipasi masalah sebelum terjadi.

Hal ini tidak hanya memperkuat kepercayaan publik dan keandalan lembaga, tetapi juga menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih kuat dalam dialog dan kerjasama internasional mengenai standar pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Peluang Loka POM di Kabupaten Banggai dalam digitalisasi proses bisnis merupakan langkah maju menuju peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional. Dengan menerapkan teknologi digital dalam alur kerjanya, Loka POM di Kabupaten Banggai dapat mengotomasi banyak proses manual yang memakan waktu, seperti registrasi produk, pelaporan, dan pemantauan kepatuhan. Automasi ini tidak hanya mengurangi beban administratif, tetapi juga meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pengelolaan data dan proses pengambilan keputusan. Lebih lanjut, penggunaan alat-alat digital dapat memperkuat kemampuan Loka POM di Kabupaten Banggai dalam mengawasi distribusi produk secara real-time, meningkatkan kemampuan Loka POM di Kabupaten Banggai untuk mengidentifikasi dan menanggapi potensi risiko keamanan produk dengan lebih cepat dan efektif, sebelum masalah tersebut berkembang menjadi isu yang lebih besar dan mempengaruhi masyarakat luas.

4. **Percepatan realiasi laboratorium yang terstandarisasi/terkreditasi**

Percepatan realisasi laboratorium yang terstandarisasi/terkreditasi membuka peluang besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Dengan laboratorium yang memenuhi standar akreditasi, kepercayaan masyarakat terhadap hasil pengujian akan semakin meningkat, sehingga mendukung terciptanya ekosistem pengawasan yang transparan dan akuntabel.

Selain itu, laboratorium terstandarisasi juga berpotensi untuk menarik lebih banyak kerja sama dengan pihak industri dan lembaga

penelitian, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini dapat mendorong peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui layanan uji produk, pelatihan, serta konsultasi terkait pengujian.

Dengan adanya laboratorium yang terakreditasi, Indonesia juga dapat memperkuat posisinya dalam perdagangan internasional, karena hasil pengujian yang diakui secara global dapat menjadi jaminan mutu produk ekspor. Peluang ini memberikan dampak signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing nasional.

5. **Tuntutan/ekspektasi yang tinggi stakeholder terhadap kinerja Loka POM di Kabupaten Banggai**

   Tuntutan dan ekspektasi yang tinggi dari stakeholder terhadap kinerja Loka POM di Kabupaten Banggai menjadi peluang besar untuk mendorong peningkatan kualitas layanan dan pengawasan yang dilakukan. Hal ini menunjukkan adanya kepercayaan masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha terhadap peran strategis Loka POM di Kabupaten Banggai sebagai lembaga pengawas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Indonesia.

   Dengan adanya ekspektasi ini, Loka POM di Kabupaten Banggai dapat memanfaatkan kesempatan untuk memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan intensif, serta mengembangkan teknologi pengawasan yang lebih modern dan efektif. Selain itu, Loka POM di Kabupaten Banggai dapat merancang program-program inovatif untuk menjawab kebutuhan stakeholder, seperti mempercepat proses evaluasi produk, meningkatkan transparansi pengawasan, dan memperluas edukasi masyarakat terkait keamanan produk.

   Ekspektasi yang tinggi juga dapat menjadi landasan untuk memperjuangkan alokasi anggaran yang lebih besar dari pemerintah, sehingga mendukung pengembangan infrastruktur laboratorium dan penguatan regulasi yang lebih tegas. Dengan menjadikan ekspektasi

ini sebagai dorongan untuk terus berinovasi, Loka POM di Kabupaten Banggai dapat meningkatkan reputasi sebagai lembaga yang kredibel, responsif, dan relevan dalam menjaga keamanan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan bagi masyarakat Indonesia.

1.2.4. Ancaman (*Threat)*

Ancaman dalam analisis SWOT merujuk pada faktor eksternal yang dapat mengganggu atau menghambat pencapaian tujuan strategis Loka POM di Kabupaten Banggai. Penyusunan strategi yang efektif membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang potensi ancaman ini, sehingga Loka POM di Kabupaten Banggai dapat merancang langkah-langkah mitigasi yang tepat. Berikut adalah beberapa komponen Ancaman *(Threat)* yang dapat mempengaruhi Loka POM di Kabupaten Banggai dalam penyusunan rencana strategisnya selama lima tahun yang akan datang:

1. ***E-commerce* dan kejahatan siber di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**

   Perkembangan teknologi dan adanya revolusi sosial (*society 5.0*) yang terjadi hari ini secara tidak langsung mengubah perilaku masyarakat selaku konsumen dalam melakukan transaksi perdagangan, termasuk berubahnya pola jual-beli produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Perubahan ini telah nyata terjadi di masyarakat yang dengan mudah menjangkau dan mengakses informasi mengenai kebutuhan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sehari-hari hanya lewat sentuhan jari dari ponselnya kapan pun dan dimanapun mereka berada tanpa harus bepergian. Tanpa kita sadari, setiap *platform e-commerce* berlomba- lomba untuk bertumbuh guna menghadirkan peningkatan kemudahan dan kecepatan bagi konsumennya hari demi hari. Namun, pertumbuhan ini sering kali membawa risiko yang signifikan, seperti adanya potensi kejahatan siber terhadap produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Kejahatan ini mencakup penjualan produk palsu, kedaluwarsa, atau yang tidak memenuhi

standar keamanan dan kesehatan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Ancaman kejahatan siber dalam konteks perdagangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan ilegal secara daring membawa tantangan besar bagi Loka POM di Kabupaten Banggai dalam upaya menjaga keamanan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang beredar luas di Indonesia. Pengawasan yang dilakukan pun tidak hanya dilakukan terhadap produk-produk lokal, tetapi juga harus dilakukan terhadap produk-produk impor yang masuk ke wilayah Indonesia. Hal ini kiranya menjadi isu yang penting karena proses identifikasi terhadap produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan ilegal harus dilakukan dengan tepat dan penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan tersebut juga harus diperkuat.

Loka POM di Kabupaten Banggai menghadapi tantangan berupa maraknya penjualan produk obat, kosmetik, dan suplemen kesehatan melalui platform daring yang tidak memiliki izin edar dari BPOM. Banyak pelaku usaha menggunakan media sosial, marketplace, maupun website tidak resmi untuk menawarkan produk dengan klaim berlebihan dan tanpa pengawasan. Modus yang sering ditemukan meliputi penyamaran identitas penjual, penggunaan label palsu, manipulasi ulasan produk, serta pengiriman barang melalui jalur logistik yang sulit ditelusuri.

Sebagai respon, Loka POM di Kabupaten Banggai melakukan langkah strategis melalui peningkatan pengawasan berbasis digital, kolaborasi lintas sektor dengan instansi penegak hukum dan pemerintah daerah, serta penguatan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya produk ilegal. Upaya ini juga diiringi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengawas, serta pengembangan mekanisme pelaporan masyarakat terhadap indikasi pelanggaran e-commerce di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

2. **Dinamika pasar yang cepat**

   Dinamika pasar yang cepat dalam industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan mempresentasikan sebuah ancaman yang signifikan bagi Loka POM di Kabupaten Banggai dalam menjalankan tugas pengawasannya. Perubahan yang terjadi secara cepat ini menuntut kebijakan yang dinamis dan adaptif untuk memastikan efektivitas dan relevansi regulasi. Khususnya, munculnya produk baru hasil terobosan penelitian dan pengembangan menantang Loka POM di Kabupaten Banggai untuk terus mengupdate pengetahuan dan metodologi pengawasan. Produk-produk ini, yang mungkin memiliki komposisi atau mekanisme kerja unik, memerlukan evaluasi keamanan dan efikasi yang tepat untuk memastikan perlindungan konsumen.

   Agar dapat mengikuti perkembangan ini, Loka POM di Kabupaten Banggai perlu mengadaptasi teknik pengujian dan analisisnya. Tantangan lainnya adalah kebutuhan regulasi yang fleksibel, yang dapat diadaptasi dengan cepat sesuai dengan perubahan pasar, serta ketepatan waktu dalam memperbarui regulasi dan standar keamanan produk. Keterlambatan dalam proses ini dapat menciptakan celah keamanan yang berpotensi dimanfaatkan oleh produk-produk baru yang belum sepenuhnya dievaluasi. Dinamika pasar yang cepat ini, dengan segala aspek kunci yang terlibat, memperjelas kompleksitas tantangan yang dihadapi Loka POM di Kabupaten Banggai dalam menjaga keamanan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di tengah perkembangan industri yang terus bergerak.

3. **Koordinasi antar lembaga belum sinergis**

   Tantangan dalam sinkronisasi kebijakan menjadi semakin kompleks dengan adanya kebutuhan untuk memastikan konsistensi kebijakan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang tidak kontradiktif dengan kebijakan sektoral lainnya. Dinamika politik dan

perubahan prioritas pemerintah juga dapat mempengaruhi kebijakan yang sedang dikembangkan, menuntut fleksibilitas dan kemampuan adaptasi yang tinggi dari Loka POM di Kabupaten Banggai. Manajemen informasi antarlembaga juga menjadi krusial, dimana efektivitas pengawasan bergantung pada pertukaran informasi yang lancar. Membangun sistem manajemen informasi terpadu yang memungkinkan berbagi data secara real-time adalah solusi yang ideal, namun hal ini juga menghadirkan tantangan teknis dan administratif yang tidak sedikit.

Kurang efektifnya koordinasi Loka POM di Kabupaten Banggai dengan lintas sektor dapat menghambat kemampuan Loka POM di Kabupaten Banggai dalam menciptakan sistem pengawasan yang terpadu dan komprehensif. Panjangnya rantai koordinasi mengakibatkan proses pengambilan keputusan menjadi lebih lambat terutama untuk kebutuhan respon cepat dalam situasi krisis. Lemahnya koordinasi juga dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan dan prioritas Kementerian/Lembaga berpotensi memperlambat pemberian respon sehingga mempengaruhi kelancaran pelayanan publik Loka POM di Kabupaten Banggai.

Sebagaimana Permendagri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Sampai dengan tahun 2023, Tim Koordinasi baru terbentuk sebanyak 23 pada tingkat Provinsi (67,55%) dan 214 pada tingkat Kabupaten/Kota (41,63%). Data ini menunjukkan pada tingkat daerah belum memiliki koordinasi yang kuat dan berpotensi meningkatkan peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang tidak memenuhi ketentuan sehingga dapat mengancam kesehatan masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, untuk mengatasi ancaman ini, perlu disusun strategi bersama untuk memastikan koordinasi lintas sektor berjalan efektif demi

kepentingan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta perlindungan kesehatan masyarakat.

4. **Penerimaan masyarakat dan industri terhadap kebijakan nasional obat dan makanan (regulasi)**

   Penerimaan masyarakat dan industri terhadap kebijakan nasional Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disusun oleh BPOM menjadi kunci utama dalam menentukan kesuksesan implementasi kebijakan tersebut. Hal ini menimbulkan tantangan multidimensi yang harus dikelola dengan cermat. Di satu sisi, masyarakat mungkin resisten terhadap perubahan yang membatasi pilihan atau akses mereka terhadap produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan tertentu. Perubahan perilaku konsumen, kepercayaan terhadap regulasi, serta persepsi risiko dan manfaat, semua berkontribusi terhadap kompleksitas dalam menciptakan kebijakan yang dapat diterima secara luas. Kebijakan yang tidak diterima dengan baik oleh masyarakat dapat mengakibatkan reaksi negatif dan mengurangi efektivitas kebijakan tersebut dalam mencapai tujuan kesehatan publik yang diinginkan.

   Di sisi lain, penerimaan industri terhadap kebijakan tersebut juga penting. Kebijakan dapat dilihat sebagai pembatasan yang mengurangi profitabilitas atau menghambat inovasi dalam industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Tantangan dalam memastikan kepatuhan industri, terutama mengingat keragaman kapasitas antara perusahaan besar hingga UMKM, memerlukan pendekatan yang bijaksana dalam formulasi kebijakan. Kebutuhan adaptasi yang mungkin memerlukan perubahan dalam proses produksi, pengemasan, atau pemasaran, serta investasi besar atau perubahan signifikan dalam waktu singkat, menambah kompleksitas dalam memastikan bahwa kebijakan tidak hanya efektif tetapi juga realistis untuk diikuti oleh industri. Resistensi dari industri, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menghambat proses inovasi dan pertumbuhan

ekonomi dalam sektor Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Oleh karena itu, menciptakan kebijakan yang mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan kesehatan publik dan keberlanjutan industri merupakan salah satu tantangan terbesar bagi Loka POM di Kabupaten Banggai, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat menjadi ancaman serius dalam analisis SWOT lembaga.

5. **Akselerasi perkembangan teknologi**

Perkembangan teknologi yang akseleratif, khususnya dalam bidang bioteknologi dan nanoteknologi, menghadirkan sebuah paradigma baru dalam industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang secara fundamental dapat mengubah *landscape* pasar dan standar produk yang berlaku. Inovasi ini terkadang dapat bertentangan dengan kerangka regulasi yang telah ditetapkan oleh BPOM, karena produk baru sering kali mengandung komponen atau mekanisme kerja yang belum pernah ada sebelumnya. Tantangan ini tidak hanya terletak pada aspek keamanan dan efikasi produk, tetapi juga pada kecepatan di mana Loka POM di Kabupaten Banggai harus bereaksi untuk memperbarui dan menyesuaikan regulasi dan metodologi pengujian untuk menjaga standar keamanan tanpa menghambat inovasi.

Ancaman yang dihadapi Loka POM di Kabupaten Banggai dalam konteks ini mencakup risiko keamanan publik akibat keterlambatan dalam merespons produk baru, potensi ketidakpastian di kalangan konsumen mengenai keamanan produk, dan kesulitan dalam memprediksi implikasi jangka panjang dari teknologi baru terhadap kesehatan dan keselamatan. Selain itu, Loka POM di Kabupaten Banggai memiliki kemampuan dalam memastikan kepatuhan industri terhadap regulasi baru menjadi semakin kompleks, mengingat sifat inovatif dari produk yang mungkin memerlukan pendekatan pengawasan yang belum pernah diterapkan sebelumnya. Ancaman ini memperjelas kebutuhan mendesak untuk sistem regulasi yang tidak hanya adaptif dan fleksibel tetapi juga mampu mengevaluasi risiko

dan manfaat teknologi baru secara efektif dan efisien, demi menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

6. **Sulitnya pengiriman sampel khusus dan ketidakterwakilan sampel dalam pedoman pengujian**

   Sulitnya pengiriman sampel khusus, seperti vaksin dan produk makanan beku (*frozen food*), menjadi tantangan besar dalam upaya pengawasan yang efektif. Proses pengiriman sampel ini memerlukan fasilitas khusus, seperti rantai dingin (*cold chain*) yang konsisten, untuk menjaga kualitas sampel hingga tiba di laboratorium.

   Ketidakterwakilan sampel dalam pedoman pengujian juga memperburuk situasi, karena dapat menyebabkan kesenjangan dalam standar pengawasan. Hal ini berpotensi menghambat deteksi risiko keamanan pangan dan sediaan farmasi, yang pada akhirnya dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan produk yang beredar. Kombinasi dari hambatan logistik dan kurangnya panduan yang spesifik ini mengancam efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Banggai dan instansi terkait.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, BUDAYA, ORGANISASI DAN SASARAN KEGIATAN

2.1 Visi

2.2 Misi

2.3 Tujuan

2.4 Sasaran Kegiatan





BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

Berdasarkan kondisi umum, potensi permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan, dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPOM secara optimal, maka Loka POM di Kabupaten Banggai berkomitmen menjalankan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran BPOM.

2.1. VISI

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, BPOM telah merumuskan visi untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman**

   Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama Loka POM di Kabupaten Banggai. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.

2. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu**

   Loka POM di Kabupaten Banggai berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.

3. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing**

   Loka POM di Kabupaten Banggai mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.

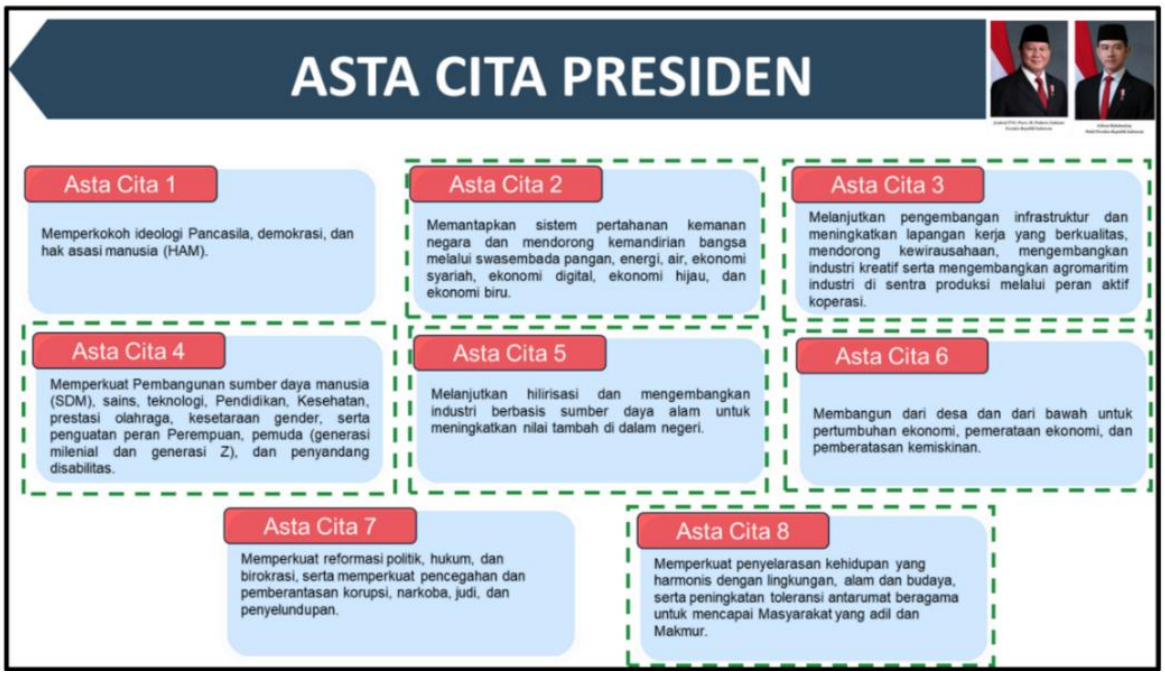
4. **Masyarakat Sehat dan Sejahtera**

   Tujuan akhir dari semua upaya Loka POM di Kabupaten Banggai adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan Loka POM di Kabupaten Banggai terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan serta pembinaan kepada industri dan UMKM dalam rangka peningkatan daya saing.

2.2. MISI

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:



Gambar 2.1. Misi Presiden Terpilih (Asta Cita)

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) , dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita

lainnya yaitu Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8 sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adala sebagai berikut:

1. **Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat**

   Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

2. **Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing**

   BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

3. **Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan**

   Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4. **Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**

   Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menunjung tinggi prinsip good govermance dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

2.3 TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan untuk periode 2025-2029 yang mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat dan peningkatan kualitas organisasi, sebagai berikut :

1. **Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu**

   Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.

2. **Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu**

   Melalui tujuan ini, BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.

3. **Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM**

   Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilitannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.

4. **Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**

   Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.

5. **Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima**

   Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima. Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

Loka POM di Kabupaten Banggai secara keseluruhan mendukung seluruh tujuan BPOM. Berbagai tujuan tersebut diukur melalui indikator sebagaimana tercantum pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Indikator Tujuan BPOM 2025-2029

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74.4	75.9	77.1	78.5	79.9

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Aman dan Bermutu	(termasuk PIRT dan MBG yang aman dan bermutu)					
2	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88.20	88.60	88.90	89.20	89.40
3	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan	Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	63.6	66.2	69.3	72.7	76.7

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Keberpihakan pada UMKM						
4	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74.4	75.9	77.1	78.5	79.9
5	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	Indeks RB BPOM	96.3	96.35	96.4	96.45	96.5

2.4. SASARAN KEGIATAN LOKA POM di KABUPATEN BANGGAI

Dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, serta mewujudkan kondisi yang secara nyata yang akan dicapai oleh Loka POM di Kabupaten Banggai, sesuai dengan tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh dinamika lingkungan strategis nasional dan global, Loka POM di Kabupaten Banggai telah merumuskan sejumlah sasaran kegiatan untuk periode 2025-2029. Sasaran- sasaran ini dirancang untuk memperkuat fondasi dan fungsi pengawasan Loka POM di Kabupaten Banggai, serta

meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha di sediaan farmasi dan pangan olahan. Berikut adalah sasaran kegiatan Loka POM di Kabupaten Banggai 2025-2029 berikut dengan penjelasannya, yang mencakup berbagai aspek kunci dari pengawasan hingga edukasi publik, dalam upaya mencapai keamanan, kualitas, dan kemandirian di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan.

SK 1: Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

BPOM memiliki tugas untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan guna melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM berperan sebagai garda terdepan yang memastikan pengawasan dilakukan secara optimal di wilayah kerjanya. Efektivitas pengawasan menjadi aspek krusial yang harus terus ditingkatkan agar potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Peningkatan efektivitas ini dilakukan melalui penguatan pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko yang terstruktur, berkesinambungan, dan berbasis data serta mendorong penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Selain itu, dalam mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), UPT berperan dalam pengujian sampel pangan MBG untuk memastikan sampel yang diuji sesuai standar keamanan dan mutu pangan. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG dapat terjamin kualitasnya serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

a. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
b. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
c. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

d. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
e. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
f. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
g. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
h. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
i. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
j. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
k. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
l. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
m. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
n. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
o. Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
p. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

SK 2: Meningkatnya efektivitas KIE

Tingginya risiko peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat menuntut BPOM untuk meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. UPT BPOM harus berperan aktif dalam mendiseminasikan informasi yang benar dan mudah dipahami agar masyarakat lebih sadar dan cermat dalam memilih dan konsumsi produk yang aman dan bermutu. Dukungan terhadap

sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan KIE kepada masyarakat yang juga terintegrasi dengan pemberdayaan komunitas dalam pengawasan pangan di sekolah, desa, dan pasar sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, melalui indikator:

a. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT;
b. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan;
c. Jumlah desa pangan aman;
d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas.

SK 3: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

UMKM yang memproduksi obat bahan alam (OBA), kosmetik, dan pangan olahan sering menghadapi kendala dalam pemenuhan standar keamanan, mutu, dan perizinan produk. Untuk itu, UPT BPOM berperan penting dalam memberikan pendampingan agar UMKM di wilayah kerjanya mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat daya saing produk UMKM di pasar. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

SK 4: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Penyalahgunaan obat dan peredaran sediaan farmasi serta pangan olahan ilegal dan palsu menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan memerlukan respons penindakan yang tegas dari BPOM. Dalam mendukung upaya tersebut, UPT BPOM berperan penting dalam melaksanakan penindakan secara efektif terhadap pelanggaran yang

terjadi di wilayah kerjanya. Penindakan yang terkoordinasi, sesuai prosedur, dan berbasis regulasi menjadi bagian integral dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan masyarakat dari produk berisiko. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

SK 5: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Meningkatnya kompleksitas pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, terutama yang memanfaatkan platform digital, menuntut BPOM untuk memperkuat upaya deteksi dini terhadap potensi kejahatan. Dalam hal ini, UPT BPOM mendukung pelaksanaan kegiatan deteksi kejahatan yang efektif di wilayah kerjanya melalui upaya cegah tangkal serta patroli siber terhadap potensi pelanggaran. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dengan mengidentifikasi dan merespons indikasi kejahatan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas bagi Masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar**.**

SK 6: Layanan Publik UPT yang Prima

Pelayanan publik yang prima merupakan bagian dari implementasi kebijakan pelayanan yang mengedepankan kemudahan akses, kepastian, dan akuntabilitas dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. UPT BPOM berkomitmen mewujudkan layanan publik yang prima melalui penguatan profesionalitas SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan inovasi pelayanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap institusi. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Indeks Pelayanan Publik UPT.

SK 7: Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang Optimal

Optimalisasi tata kelola pemerintahan di lingkungan UPT BPOM merupakan landasan penting untuk mendukung kinerja organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Tata kelola yang baik tercermin dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang konsisten, pembangunan zona integritas sebagai komitmen antikorupsi, efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap proses kerja. Seluruh aspek tersebut diperkuat melalui pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang terarah dan berkelanjutan, guna mendorong perbaikan sistem, peningkatan pelayanan publik, dan budaya kerja yang profesional. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

a. Nilai AKIP UPT BPOM;
b. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM;
c. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM;
d. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT

Tabel 2.2 Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, & Indikator Loka POM di Kabupaten Banggai 2025-2029

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu *Indikator:* *Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu*	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan *Indikator:* 1. *Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu* 2. *Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu (2025)* 3. *Persentase Pangan Olahan, PIRT dan MBG yang aman dan bermutu (2026-2029)* 4. *Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan*	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT *Indikator:* 1. *Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan* 2. *Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO* 3. *Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan* 4. *Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT*

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
		5. *Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan* 6. *Persentase penguatan laboratorium pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan terhadap standar yang ditetapkan*	5. *Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan* 6. *Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder* 7. *Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan* 8. *Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan* 9. *Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan* 10. *Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan*

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
			11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan *12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar* *13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT* *14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium* *15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota pangan aman* *16. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (2026-2029)*

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan *Indikator:* *Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan*	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan *Indikator:* *Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan* Meningkatnya efektivitas *regulatory assistance* dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT *Indikator:* *Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT*
			Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT *Indikator:* *Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar*

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
		Indikator: *Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan*	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu *Indikator:* *Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan*
Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian		

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM *Indikator:* *Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan*		
Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Meningkatnya efektivitas KIE *Indikator:* 1. *Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT*

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan	yang Aman dan Bermutu *Indikator:* *Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu*	*Indikator:* *Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu*	2. *Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan* 3. *Jumlah desa pangan aman* 4. *Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas*
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima	Layanan Publik UPT yang prima *Indikator:* *Indeks Pelayanan Publik UPT*

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	serta Layanan Publik yang Prima *Indikator:* *Indeks RB BPOM*	*Indikator:* *Indeks RB BPOM*	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal *Indikator:* 1. *Nilai AKIP UPT BPOM* 2. *Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM* 3. *Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM* 4. *Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT*

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029 secara optimal, perlu dilakukan identifikasi risiko dari setiap sasaran strategis tersebut. Melalui identifikasi risiko, berbagai potensi hambatan dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan program dapat dikenali sejak dini. Hal ini memungkinkan Loka POM di Kabupaten Banggai untuk mengambil langkah antisipatif dan strategi mitigasi yang tepat, sehingga mendukung tercapainya sasaran strategis dengan lebih efektif dan efisien. Identifikasi risiko tentunya disusun sebagai bagian integral dari proses perencanaan strategis, guna memastikan pengelolaan risiko yang sistematis dan terukur dalam mendukung kinerja organisasi. Berikut adalah identifikasi indikasi risiko sasaran strategis BPOM sebagaimana tercantum dalam tabel 2.3.

Tabel 2.3 Indikasi Risiko Sasaran Strategis Loka POM di Kabupaten Banggai

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Target pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan belum menjangkau ke daerah terpencil.	a. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten; b. Mengalokasikan anggaran khusus untuk pemeriksaan daerah terpencil minimal 1 kegiatan di setiap tahunnya pada saat penyusunan RAB pemeriksaan.	Fungsi Pemeriksaan
		Masih terdapat sarana produksi dan distribusi	Pemilihan sarana yang dilakukan pemeriksaan di	Fungsi Pemeriksaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		yang TMK di wilayah kerja Loka POM yang melakukan kegiatan produksi dan/atau distribusi yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	prioritaskan terhadap sarana yang telah dibina sebelumnya, terhadap sarana baru/belum memiliki riwayat pemeriksaan diarahkan untuk dilakukan pembinaan terlebih dahulu.	
		Keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Banggai tidak tidak ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha dan/atau Pemangku Kepentingan.	a. Setiap Petugas membuat dokumen monitoring (excel) untuk setiap STL yang menjadi tanggung jawabnya; b. Setiap petugas memastikan STL telah dikirim/sampai kepada pelaku usaha.	Fungsi Pemeriksaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		Sampel regionalisasi diterima oleh balai penguji di luar tenggat waktu yang telah disepakati.	a. Setiap pengiriman dipastikan dapat dilacak melalui nomor telepon travel yang digunakan atau melalui nomor resi b. Pembagian tugas sampling paling lambat pada minggu ke-2 bulan berjalan	Fungsi Pemeriksaan
		Hasil pengawasan/ pemeriksaan Produk dan sarana/fasilitas produksi, distribusi dan pelayanan obat dan makanan tidak sesuai dengan ketentuan karena dilakukan oleh personil yang belum memiliki kompetensi sesuai.	Penyusunan Rencana Pelaksanaan kegiatan dibuat dengan mempertimbangk-an kompetensi pegawai (pemeriksaan saryanfar menyertakan 1 orang inspektur obat, pemeriksaan produksi menyertakan 1 orang inspektur pangan, petugas pemeriksaan OMKABA harus mengikuti pelatihan terkait fungsi pemeriksaan).	Fungsi Pemeriksaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		Masih terdapat kendala dalam proses pengambilan sampel regionalisasi.	a. Memastikan seluruh petugas mempunyai pedoman sampling. dengan mendatangani bukti penerimaan pedoman sampling; b. Seluruh sampel harus dilakukan pengecekan kembali oleh penanggung jawab sampling.	Fungsi Pemeriksaan
2	Meningkatnya Efektivitas KIE	Rendahnya nilai efektivitas KIE.	Mendampingi obyek survey dalam melakukan pengisian survey.	Fungsi Infokom
3	Meningkatnya Pendampingan UMKM dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu	UMKM yang dilakukan pendampingan berpotensi tidak sesuai dengan Pedoman Petunjuk Teknis.	a. Membagikan Juknis Pendampingan UMKM kepada setiap petugas yang terlibat; b. Melakukan rapat bersama membahas daftar UMKM pilihan yang akan didampingi.	Fungsi Pemeriksaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Terjadi benturan kepentingan antara petugas dengan penegak hukum lainnya dalam bentuk Intervensi yaitu memindahkan atau menggagalkan proses penindakan yang sedang atau akan berjalan. Terjadi benturan kepentingan antara petugas dengan penegak hukum lainnya dalam bentuk Intervensi yaitu memindahkan atau menggagalkan proses penindakan yang sedang atau akan berjalan.	a. Meningkatkan koordinasi lintas sektor baik secara formal dan informal dengan para penegak hukum yang bersinggungan target perkara dengan Badan POM seperti Kepolisian; b. Penggalangan terhadap Lintas sektor yang bersinggungan dengan proses penindakan.	Fungsi Penindakan
		Pra peradilan yang ditujukan	a. Seluruh petugas penindakan	Fungsi Penindakan

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		kepada Loka POM di Kab. Banggai.	mengikuti pengembangan kopetensi terkait penindakan; b. Setiap penyidikan dilakukan gelar kasus dengan menghadirkan Korwas dan instansi terkait.; c. Setiap proses penyidikan dan upaya paksa dikoordinasikan dengan Korwas	
		Terhambatnya proses penyidikan yang berisiko pada pra peradilan.	Meningkatkan koordinasi Lintas Sektor dengan pihak Kepolisian	Fungsi Penindakan
5	Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di	Masih maraknya tautan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan ilegal yang diedarkan secara daring.	a. Memperkuat koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait penerapan kebijakan Negative List b. Melakukan perkuatan infrastruktur yang	Fungsi Penindakan

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
	Wilayah Kerja UPT		digunakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemantauan peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan ilegal secara daring	
6	Layanan Publik UPT yang Prima	Rendahnya nilai indeks Pelayanan Publik UPT.	Penetapan PIC pada setiap kelompok indikator penilaian dan pelaksanaan monev.	Tata Usaha
7	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Beban kerja pegawai dengan jabatan PFM di fungsi pemeriksaan tidak sesuai dengan jumlah pegawai yang ada.	Pengajuan Pengadaan pegawai sesuai dengan ABK jabatan PFM kepada Badan POM.	Tata Usaha
		Penyalahgunaan wewenang terkait pelaporan dan pembebanan biaya pribadi	a. Persetujuan KPA dan PPK; b. Reviu atas pengeluaran dan proses reimbursment yang	Tata Usaha

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		menjadi beban instansi.	dilakukan oleh petugas.	
		Pelaku usaha memberikan gratifikasi kepada petugas.	a. Pakta integritas petugas, pemberitahuan melalui media sosial; b. Pencantuman pengumuman tidak menerima gratifikasi pada surat tugas.	Tata Usaha
		Daya listrik pada gedung kantor Loka POM Banggai tidak dapat menunjang seluruh peralatan listrik yang dibutuhkan dalam kegiatan sehari-hari di Loka POM di Kab. Banggai.	a. Dilakukan penyesuaian penggunakan peralatan Listrik agar daya tidak melebihi; b. Mengajukan pengusulan anggaran untuk sewa gedung tambahan.	Tata Usaha
		Tidak optimalnya pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan T.A 2025.	Tetap menjadwalkan pengawasan sesuai renlak awal.	Tata Usaha

BADAN POM

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kabupaten Banggai

3.3 Kerangka Regulasi

3.4 Kerangka Kelembagaan





BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPOM

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG: Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk pada sarana yang tidak berizin.

   Perluasan cakupan pengawasan BPOM pada Program MBG merupakan wujud dukungan dalam pencapaian tujuan program strategis tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah). Tujuan ini hanya dapat tercapai jika terdapat di dalamnya penjaminan aspek keamanan pangan sebagai fondasi awal dalam tercapainya asupan gizi yang baik. Pengawalan aspek keamanan pangan akan efektif apabila dilaksanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir di sepanjang rantai produksi dan distribusi. Periode waktu yang relatif pendek antara produksi dan konsumsi, semakin menggarisbawahi bahwa penjaminan keamanan pangan tidak bisa

didasarkan pada pengujian produk semata, namun harus dititikberatkan pada pentingnya pencegahan proaktif terhadap bahaya pangan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara pemastian penerapan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik serta penguatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia penanggung jawab dan penjamah pangan MBG.

2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline: Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, baik online maupun offline.

3. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: BPOM fokus pada peningkatan regulatory assistance untuk memperkuat dukungan terhadap industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui reliance serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.

4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan

kesadaran akan pentingnya mengonsumsi produk yang aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan.

5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan kapabilitas BPOM dan kepercayaan tingkat global terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan BPOM.

6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik: BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan demi kesehatan masyarakat.

Strategi Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data.
7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Tabel 3.1 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi BPOM 2025-2029

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan pengawasan *pre-post market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal	Penguatan pengawasan *premarket* dan *post market* sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin sert Program Makan Bergizi Gratis.	komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan *farmakovigilans*, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline.	Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM.	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data.
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.	Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI LOKA POM DI KABUPATEN BANGGAI

Dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi BPOM, serta memperhitungkan lingkungan strategis Loka POM di Kabupaten Banggai, telah dilakukan analisis SWOT untuk menyusun dan menetapkan arah kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Loka POM di Kab. Banggai periode 2025-2029. Adapun arah kebijakan dan strategi Loka POM di Kab. Banggai sebagai berikut :

Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan :

1. Peningkatan pemahaman, kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan;

2. Peningkatan kapasitas SDM Loka POM di Kab. Banggai dan pemangku kepentingan, kualitas analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan;
3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan;
4. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik;
5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait;
6. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan;
7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, Loka POM di Kab. Banggai melakukan analisis program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan strategi sebagai berikut:

1. Komitmen pimpinan dan seluruh ASN Loka POM di Kab. Banggai untuk menerapkan Reformasi Birokrasi di enam area perubahan termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik;
2. Optimalisasi penyebaran informasi dan edukasi pada masyarakat untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan;
3. Peningkatan efektivitas pemanfaatan TIK, pengujian, serta penguatan database pengawasan Obat dan Makanan;
4. Optimalisasi pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran;

5. Penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan yang komprehensif (*full spectrum*) mencakup premarket dan postmarket serta optimalisasi peran Loka POM di Kab. Banggai dalam memenuhi ekspektasi masyarakat terkait peran BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan;
6. Penguatan *networking* dengan lembaga-lembaga pusat/daerah dalam pengawasan Obat dan Makanan;
7. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan Obat dan Makanan;
8. Intensifikasi pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha sehingga dapat memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan.

Tabel 3.1 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kab. Banggai Tahun 2025-2029

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan pengawasan *pre-post market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal *farmakovigilans*, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis.	Penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan yang komprehensif (*full spectrum*) mencakup premarket dan postmarket serta optimalisasi peran Loka POM di Kab. Banggai Tahun 2025-2029 dalam memenuhi ekspektasi masyarakat terkait peran BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan.
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi	Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan Obat dan Makanan.

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline*.	
Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM.	Komitmen pimpinan dan seluruh ASN Loka POM di Kab. Banggai untuk menerapkan Reformasi Birokrasi di enam area perubahan termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	Optimalisasi penyebaran informasi dan edukasi pada masyarakat untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	Penguatan *networking* dengan lembaga-lembaga pusat/daerah dalam pengawasan Obat dan Makanan.
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	Optimalisasi pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.	Peningkatan efektivitas pemanfaatan TIK, pengujian, serta penguatan database pengawasan Obat dan Makanan.

Memperhatikan bahwa pengarusutamaan gender dan inklusi sosial menjadi salah satu prinsip pembangunan dalam RPJPN Tahun 2025-2045 maupun RPJMN Tahun 2025-2029, maka implementasi arah kebijakan dan strategi di atas dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial.

Adapun kegiatan prioritas yang mendukung Arah Kebijakan dan Strategi tersebut, dijabarkan sebagai berikut:

1. **Kegiatan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Seluruh Indonesia**

   Untuk mendukung arah kebijakan dan strategi di atas, Loka POM di Kabupaten Banggai melaksanakan kegiatan "Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia". Pengawasan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Banggai mencakup pengawasan pre dan post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk pre dan post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

   Dalam mekanisme *pre-market control*, Loka POM di Kabupaten Banggai menjalankan pengawasan sesuai batas kewenangan yang diberikan, tanpa mencakup proses penyusunan standar. Sementara pada tahap *post-market*, pengawasan dilakukan secara menyeluruh melalui kegiatan inspeksi, sampling, dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar di wilayah kerja untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga menyentuh pendekatan strategis melalui penyediaan layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, serta advokasi dan penguatan kerja sama lintas sektor. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengonsumsi produk Obat dan Makanan yang aman serta mendorong pelaku usaha untuk menerapkan prinsip kepatuhan secara berkelanjutan.

Loka POM di Kabupaten Banggai yang merupakan salah satu satuan kerja yang berada di daerah, tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan, akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi BPOM.

2. Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Kegiatan ini berfokus pada pengelolaan BMN, belanja pegawai (gaji) serta pemeliharan rutin dalam rangka mendukung Pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di Loka POM di Kabupaten Banggai.

Kegiatan ini berfokus pada pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), belanja pegawai, serta pemeliharaan rutin sebagai unsur fundamental dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Banggai. Pengelolaan BMN dilakukan untuk memastikan seluruh aset operasional, baik berupa sarana prasarana kantor, peralatan pengawasan, maupun kendaraan dinas dapat digunakan secara optimal dan berkelanjutan dalam menunjang tugas pengawasan di lapangan. Proses pengelolaan ini mencakup perencanaan kebutuhan, pencatatan dan pelaporan aset, pemanfaatan secara efektif, hingga pengamanan dan pemeliharaan guna menjaga fungsi dan akuntabilitas aset negara.

Di sisi lain, belanja pegawai, khususnya pembayaran gaji, menjadi komponen krusial yang menjamin hak dan kesejahteraan sumber daya manusia sebagai pelaksana utama fungsi pengawasan. Pemenuhan kebutuhan belanja pegawai secara tepat waktu dan akurat turut mendorong peningkatan motivasi, kinerja, serta profesionalisme ASN dalam menjalankan tugas perlindungan masyarakat di bidang Obat dan Makanan.

Selain itu, pemeliharaan rutin terhadap BMN dan fasilitas operasional dilaksanakan untuk memastikan kelayakan dan kesiapan seluruh sarana pendukung, sehingga kegiatan

pengawasan dapat berjalan tanpa hambatan. Pemeliharaan yang berkesinambungan juga menjadi bagian dari upaya efisiensi anggaran melalui pencegahan kerusakan aset di kemudian hari.

Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya bersifat administratif, namun strategis karena menjadi pilar pendukung kelancaran sistem pengawasan Obat dan Makanan. Kelola manajemen aset, pemenuhan belanja pegawai, dan pemeliharaan rutin yang baik berkontribusi langsung terhadap peningkatan kinerja Loka POM di Kabupaten Banggai dalam memberikan perlindungan kesehatan masyarakat secara optimal.

BADAN POM

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

4.2 Kerangka Pendanaan





BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Loka POM di Kabupaten Banggai untuk periode 2025-2029, disusunlah matriks kinerja pembangunan yang akan menjadi sasaran akhir pembangunan Loka POM di Kabupaten Banggai dalam memperkuat pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Matriks ini memuat sasaran kegiatan yang mencerminkan visi Loka POM di Kabupaten Banggai, serta indikator kinerja utama (IKU) dan target-target spesifik yang telah dirancang untuk memastikan pencapaian perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Setiap indikator dan target yang tercantum dalam matriks ini merupakan komponen penting yang menggambarkan hasil akhir yang ingin diraih Loka POM di Kabupaten Banggai selama periode lima tahun.

Matriks kinerja ini menegaskan tujuan utama Loka POM di Kabupaten Banggai, yaitu memastikan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang beredar di masyarakat aman, bermutu, dan berdaya saing. Oleh karena itu, Loka POM di Kabupaten Banggai diharapkan menjadikan matriks ini sebagai acuan mutlak dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja.

Tabel 4.1 Matriks Kerangka Kinerja Loka POM di Kabupaten Banggai 2025-2029

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan	1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang	80.75	82.25	84.00	85.50	87.00

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banggai	ditindaklanjuti sesuai ketentuan					
		2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	0	27	28	29	30
		3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	77	79	81	83
		4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100
		5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	87	89	92	95
		6.Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi	70.00	72.00	74.00	76.00	78.00

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
		dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder*					
		7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	94	96	98	100
		8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	87	89	92	95
		9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89.50	90.75	92.00	93.25	94.50
		10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	82	84	87	90

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
		11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	82.00	83.60	85.20	87.00	88.80
		12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80	81	82	83	84
		13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	100	100	100	100
		14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11.5	12.5	13.5	16.5	20

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
		15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan aman	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
		16. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	81	82	83	84
2	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banggai	1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banggai	85.07	85.92	86.77	87.62	88.47
		2. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	3	4	5	6
		3. Jumlah desa pangan aman	1	1	1	1	1

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
		4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	1	1	1
3	UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu di wilayah kerja Loka POM di Kab. Banggai	1. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	14.81	29.63	48.15	70.37	100
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Loka POM Kab. Banggai	1. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Loka POM Kabupaten Banggai	78	79	80	81	82

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Loka POM di Kab. Banggai	1. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	91	92	93	94
6	Layanan Publik Loka POM di Kabupaten Banggai yang prima	1. Indeks Pelayanan Publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banggai	3.60	3.70	3.80	3.90	4.00
7	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	1. Nilai AKIP Loka POM di Kab. Banggai	76.66	77.66	78.66	79.66	80.66
		2. Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Banggai	5	5	5	5	5
		3. Indeks Manajemen Risiko Loka POM di Kab.banggai	2.5	3.0	3.0	3.0	3.0
		4.Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di	100	100	100	100	100

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
		Kab.Banggai Kabupaten Banggai					

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Untuk mendukung berjalannya program dan kegiatan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, maka perlu didukung oleh anggaran pembangunan yang memadai. Kerangka pendanaan yang dibutuhkan dalam lima tahun ke depan terlampir dalam matriks berikut:

Tabel 4.2. Kerangka Pendanaan Loka POM di Kabupaten Banggai 2025-2029

Kegiatan	Alokasi (Rp)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Seluruh Indonesia	2.110.687.000	2.321.755.700	2.553.931.270	2.809.324.397	3.090.256.837
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	1.256.280.000	1.381.908.000	1.520.098.800	1.672.108.680	1.839.319.548
TOTAL	**3.366.967.000**	**3.703.663.700**	**4.074.030.070**	**4.481.433.077**	**4.929.576.385**

Tabel 4.3 Kerangka Pendanaan Loka POM di Kabupaten Banggai 2025-2029 Berdasarkan Sumber Dana

Sumber Dana	Alokasi (Rp)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Rupiah Murni (RM)	3.366.967.000	3.703.663.700	4.074.030.070	4.481.433.077	4.929.576.385
TOTAL	**3.366.967.000**	**3.703.663.700**	**4.074.030.070**	**4.481.433.077**	**4.929.576.385**

Sumber dana di Loka POM di kabupaten Banggai hanya bersumber dari Rupiah Murni (RM) karena belum memiliki target PNBP.

Kerangka pendanaan tersebut disusun dengan memperhatikan tantangan pengawasan Loka POM di Kabupaten Banggai dalam kurun waktu 2025-2029 serta dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran kegiatan Loka POM di Kabupaten Banggai yang ingin dicapai. Pada akhir 2025-2029, Loka POM di Kabupaten Banggai diharapkan mampu:

1. Meningkatkan efektifitas pengawasan bersama lintas sektor dalam mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu;
2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan KIE guna mewujudkan masyarakat yang cerdas memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu melalui program;
3. Mendorong pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan anan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM melalui berbagai kegiatan pembinaan/ *regulatory assistance* yang diberikan kepada pelaku usaha;
4. Meningkatkan perlindungan masyarakat dari kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui penyelenggaraan fungsi deteksi kejahatan dan penyidikan yang optimal.
5. Mewujudkan BPOM sebagai organisasi yang profesional, adaptif, efektif dan efisien serta memberikan layanan publik yang prima.

BAB V

PENUTUP





BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Banggai 2025-2029 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang mengacu pada SAKIP Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Renstra Loka POM di Kabupaten Banggai 2025-2029 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, arah kebijakan dan strategi menjadi pedoman penyusunan perencanaan di level bawah di lingkungan Loka POM di Kabupaten Banggai baik untuk perencanaan menengah dan tahunan. Untuk memastikan Renstra yang disusun dapat berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi Renstra Loka POM Banggai secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku.

Renstra Loka POM di Kabupaten Banggai 2025-2029 harus dijadikan acuan kerja bagi setiap subbagian di lingkungan Loka POM di Kabupaten Banggai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua subbagian dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada penigkatan kinerja unit kerja sampai pada level individu dan hasil pelaksanaan Renstra Loka POM di Kabupaten Banggai 2025-2029 dapat bermanfaat bagi masyarakat pada lingkungan kerja Loka POM di Kabupaten Banggai khususnya dan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya.

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Loka POM di Kabupaten Banggai														UPT BPOM
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia									**2.110.687.000**	**2.321.755.700**	**2.553.931.270**	**2.809.324.397**	**3.090.256.837**	UPT BPOM
	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT													UPT BPOM
	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Loka POM Kab. Banggai	80.75	82.25	84.00	85.50	87.00						UPT BPOM
	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Loka POM Kab. Banggai	0	27	28	29	30						UPT BPOM
	3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Loka POM Kab. Banggai	75	77	79	81	83						UPT BPOM
	4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Loka POM Kab. Banggai	100	100	100	100	100						UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Loka POM Kab. Banggai	85	87	89	92	95						UPT BPOM
	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Loka POM Kab. Banggai	70.00	72.00	74.00	76.00	78.00						UPT BPOM
	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Loka POM Kab. Banggai	92	94	96	98	100						UPT BPOM
	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Loka POM Kab. Banggai	85	87	89	92	95						UPT BPOM
	9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Loka POM Kab. Banggai	89.50	90.75	92.00	93.25	94.50						UPT BPOM
	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Loka POM Kab. Banggai	80	82	84	87	90						UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Loka POM Kab. Banggai	82.00	83.60	85.20	87.00	88.80						UPT BPOM
	12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Loka POM Kab. Banggai	80	81	82	83	84						UPT BPOM
	13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Loka POM Kab. Banggai	100	100	100	100	100						UPT BPOM
	14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Loka POM Kab. Banggai	11.5	12.5	13.5	16.5	20						UPT BPOM
	15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Loka POM Kab. Banggai	25.00	25.00	25.00	50.00	50.00						UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	16 Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Loka POM Kab. Banggai	0	81	82	83	84						UPT BPOM
	RO 1: Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans	Loka POM Kab. Banggai	0	25	25	25	25						UPT BPOM
	RO 2: Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Loka POM Kab. Banggai	51	51	54	57	60						UPT BPOM
	RO 3: Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	Loka POM Kab. Banggai	102	103	108	113	119						UPT BPOM
	RO 4: Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Loka POM Kab. Banggai	13	13	14	16	17						UPT BPOM
	RO 5: Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Loka POM Kab. Banggai	124	138	149	160	174						UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 6: Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa yang diperiksa sesuai standar oleh UPT BPOM	Loka POM Kab. Banggai	84	84	84	84	84						UPT BPOM
	RO 7: Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	Loka POM Kab. Banggai	1	1	1	1	1						UPT BPOM
	RO 8: Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Loka POM Kab. Banggai	1	1	1	1	1						UPT BPOM
	RO 9: Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Loka POM Kab. Banggai	1	1	1	1	1						UPT BPOM
	RO 10: Sampel Makanan Bergizi Gratis yang diuji sesuai standar	Loka POM Kab. Banggai	0	227	227	227	227						UPT BPOM
	Meningkatnya efektivitas KIE												UPT BPOM
	1 Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Loka POM Kab. Banggai	85.07	85.92	86.77	87.62	88.47						UPT BPOM
	2 Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Loka POM Kab. Banggai	2	3	4	5	6						UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	3 Jumlah desa pangan aman	Loka POM Kab. Banggai	1	1	1	1	1						UPT BPOM
	4 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Loka POM Kab. Banggai	1	1	1	1	1						UPT BPOM
	RO 1: Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	Loka POM Kab. Banggai	103	150	180	216	259						UPT BPOM, Dit. PMPU OTSKK, & Dit. PMPU Pangan Olahan
	RO 2: Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	Loka POM Kab. Banggai	16	4	5	5	6						UPT BPOM
	RO 3: Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Loka POM Kab. Banggai	2	3	4	5	6						UPT BPOM
	RO 4: Desa Pangan Aman	Loka POM Kab. Banggai	1	1	1	1	1						UPT BPOM
	RO 5: Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Loka POM Kab. Banggai	1	1	1	1	1						UPT BPOM
	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu												UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	1 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Loka POM Kab. Banggai	14.81	29.63	48.15	70.37	100						UPT BPOM
	RO 1: UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	Loka POM Kab. Banggai	4	4	5	6	8						UPT BPOM
	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT												UPT BPOM
	1 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Loka POM Kab. Banggai	78	79	80	81	82						UPT BPOM
	RO 1: Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan	Loka POM Kab. Banggai	1	1	1	2	2						UPT BPOM
	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT												UPT BPOM
	1 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Loka POM Kab. Banggai	90	91	92	93	94						UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 1: Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		Loka POM Kab. Banggai	14	14	15	15	15						UPT BPOM
	Layanan Publik UPT yang prima													UPT BPOM
	1	Indeks Pelayanan Publik UPT	Loka POM Kab. Banggai	3.60	3.70	3.80	3.90	4.00						UPT BPOM
	RO 1: Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT		Loka POM Kab. Banggai	5	18	19	21	21						UPT BPOM
	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal													UPT BPOM
	1	Nilai AKIP UPT BPOM	Loka POM Kab. Banggai	76.66	77.66	78.66	79.66	80.66						UPT BPOM
	2	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Loka POM Kab. Banggai	5	5	5	5	5						UPT BPOM
	3	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Loka POM Kab. Banggai	2.5	3.0	3.0	3.0	3.0						UPT BPOM dan Direktorat Kedeputian 1,2,3,4
	4	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	Loka POM Kab. Banggai	100	100	100	100	100						UPT BPOM dan Direktorat Kedeputian 1,2,3,4

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 1: Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Loka POM Kab. Banggai	1	1	1	1	1						UPT BPOM dan Deputi 1,2,3,4
	RO 2: Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Loka POM Kab. Banggai	1	1	1	1	1						UPT BPOM
	RO 3: Perangkat pengolah data dan komunikasi	Loka POM Kab. Banggai	4	4	5	5	5						UPT BPOM
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM								**1.256.280.000**	**1.381.908.000**	**1.520.098.800**	**1.672.108.680**	**1.839.319.548**	UPT BPOM
	RO 4: Layanan BMN Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"	Loka POM Kab. Banggai	1	1	1	1	1						UPT BPOM
	RO 5: Layanan Perkantoran Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"	Loka POM Kab. Banggai	1	1	1	1	1						UPT BPOM

BADAN POM

TERIMA KASIH



